

SINERGI



Ikuti
Kuis BPIW
di hal.71

**2020-2024,
Periode Penguatan
Organisasi BPIW**





**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpw@gmail.com Telp. +6221-2751 5804

Salam Sinergi

Pembaca yang terhormat, Buletin Sinergi telah memasuki edisi 39, April-Mei 2019. Tema besar pada edisi kali ini yakni langkah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merumuskan *Blue Print* pengembangan organisasinya untuk periode 2020-2024. Upaya yang dilakukan ini untuk penguatan struktur organisasi BPIW. Tema itu dibahas di rubrik Kabar Utama.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR untuk periode yang sama, juga menjadi tugas yang kini sedang dijalankan BPIW. Arah pembangunan infrastruktur sektor PUPR jangka menengah itu diulas di Laporan Khusus.

Dalam rubrik Teknologi diuraikan mengenai pemanfaatan Semburan Lumpur Sidoarjo sebagai bahan bangunan keramik berupa genteng, bata merah, agregat, dan panel ringan. Informasi mengenai Lima Kota Pusaka Terpopuler di Indonesia ditampilkan di rubrik Serba-serbi. Selain itu, rubrik Review mengupas sebuah buku yang berjudul "Kaca Benggala, Perkembangan Habitat Manusia di Indonesia".

Beberapa rubrik ringan juga masih mewarnai Buletin Sinergi seperti Jalan-jalan, Tips, dan Potret. Souvenir cantik masih disediakan bagi pembaca yang bisa menjawab pertanyaan dari redaksi dalam Kuis BPIW.

Kami berharap sajian yang ada di Buletin Sinergi edisi kali ini dapat memenuhi harapan pembaca yang budiman serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR

Salam hormat,

Redaksi

SINERGI

BULETIN BPIW

Tim Penyusun

Pengarah:
Hadi Sucahyono

Penanggung Jawab:
Firman Hatorangan Napitupulu

Penasihat
Bobby Prabowo
Iwan Nurwanto
Kuswardono
Agusta Ersada Sinulingga

Pemimpin Redaksi
P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana
Shovich

Staf Editor :
Hendra Djamal
Mutri Batul Aini

Tim Pembuat Artikel:
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah
Alis Listalatu
Rian Farhan
Tim Kontributor Pemberitaan

Sekretariat:
Untung Priyono
Nur Wahyu

Diterbitkan oleh:
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:
Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Email: humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id
Website: bpiw.pu.go.id
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id

Design Grafis : Heri Hito
Infografis, layout & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi



4 Kabar Utama: 2020-2024, Periode Penguatan Organisasi BPIW



20 Wawancara:
Rudy Soepriyadi Prawiradinata:
Pengembangan Wilayah Butuh Penguatan
Sinergi Pembangunan



44 Lapsus:
Ditetapkan 2020, Proses Penyusunan
Terus Ditajamkan dan Dimatangkan

50 Opini
Orange Smart City 4.0

56 Infografis: Jembatan Bintan-Batam

58 Jalan-jalan
Menikmati Pesona
Golden Sunrise di Bromo

60 Kilas BPIW
BPIW Dukung Percepatan Pembangunan
di Malut



35 Jurnal Ilmiah:
Berjalan dengan Sepatu Orang
Lain: Tantangan Epistemologi dalam
Perencanaan Partisipatif

- 41**
- Pengembangan Kota Baru Untuk Mengantisipasi *Urban Sprawl*
 - BPIW Akan Lakukan Kajian Ibu Kota Negara yang Baru



66 Serba-Serbi
Inilah 5 Kota Pusaka Terkenal
di Tanah Air

68 Teknologi
Semburan Lumpur Sidoarjo Sebagai
Material Konstruksi

2020-2024, Periode Penguatan Organisasi BPIW



Kekompakan yang terus dijaga seluruh staf dan pimpinan sangat penting untuk peningkatan kinerja BPIW.

Di tengah-tengah kegiatan yang dilakukan pada tahun ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai merumuskan Blue Print pengembangan organisasinya untuk periode 2020-2024. Perumusan Blue Print yang dapat mendukung arahan keterpaduan ini, berujung pada penguatan struktur organisasi tersebut.



Sumber: BPIW

BPIW merupakan salah satu unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun kini telah dikeluarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR yang baru, yakni Permen Nomor 3/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam koridor aturan itu disebutkan bahwa tugas BPIW adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

Selain tugas itu, lembaga ini memiliki fungsi sebagai penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang PUPR. Tugas lain yang diemban BPIW adalah penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR dan pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR.

Disamping itu, BPIW memiliki tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang

Tugas BPIW adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

Dilandasi tugas dan fungsi itu, sejak 2015 hingga 2019, ada 12 capaian kegiatan BPIW

diberikan oleh Menteri juga menjadi bagian tugasnya.

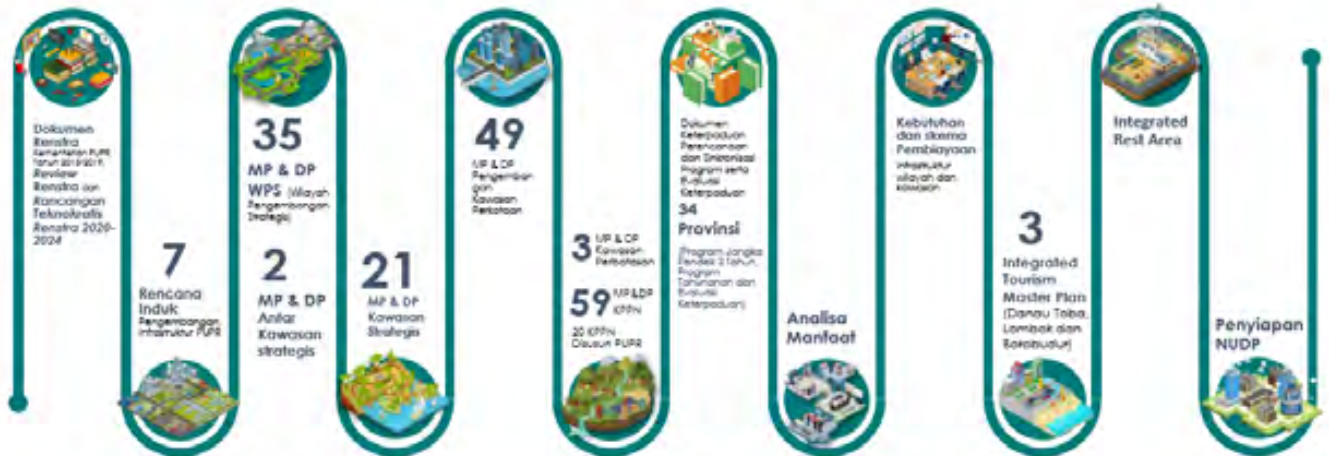
Dilandasi tugas dan fungsi itu, sejak 2015 hingga 2019, ada 12 capaian kegiatan BPIW yakni membuat Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, *Review* Renstra dan Rancangan Teknokratis Renstra 2020-2024. Kemudian BPIW telah membuat tujuh Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR.

Sebanyak 35 *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan 2 *Development Plan* (DP)

Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Program serta Evaluasi Keterpaduan. Selain itu telah dibuat Program Jangka Pendek Tiga Tahun, Program Tahunan, dan Evaluasi Keterpaduan.

Tidak hanya itu, BPIW juga telah membuat Analisa Manfaat, Kebutuhan dan Skema Pembiayaan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan di tiga *Integrated Tourism Masterplan* (Danau Toba, Lombok dan Borobudur), *Integrated Rest Area* (Trenggalek, Jawa Timur dan Jembrana, Bali), dan *Penyiapan National Urban Development Project* (NUDP).

CAPAIAN KEGIATAN BPIW 2015-2019



Antar Kawasan Strategi, juga telah diselesaikan dengan baik. Selain itu telah dibuat 21 MPDP Kawasan Strategis.

Selanjutnya, telah dibuat sembilan MPDP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Tidak hanya itu, BPIW telah menghasilkan tiga MPDP Kawasan Perbatasan dan 20 MPDP Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), dari total 59 KPPN secara nasional.

Untuk 34 provinsi di Indonesia, BPIW telah membuat Dokumen

Perumusan *Blue Print*

Meski telah menghasilkan berbagai capaian, BPIW tak berhenti melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan *output* dan perannya. Untuk itu saat ini BPIW tengah melakukan penajaman *output* dan peran BPIW lima tahun selanjutnya, yakni 2020-2024.

Penajaman dilakukan melalui identifikasi resiko, tugas, dan fungsi BPIW sebagai upaya perumusan *Blue Print* Pengembangan Organisasi BPIW kedepan yang

dapat mendukung arahan keterpaduan kebijakan program pengembangan infrastruktur wilayah sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan (ABCP) di lingkungan PUPR.

Kegiatan ini nantinya akan berujung pada penguatan struktur organisasi. Penguatan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri. "Penguatan Organisasi BPIW akan difokuskan kepada struktur yang semula dititikberatkan pada perwilayahan yang bersifat sektoral seperti pulau, kawasan, dan kota/desa, menjadi perwilayahan nasional berbasis pulau dan kepulauan sebagai satu kesatuan unit perencanaan," ujar Sekretaris BPIW, Firman Hatorangan Napitupulu beberapa waktu yang lalu.

Langkah yang dilakukan BPIW tersebut merupakan pelaksanaan amanat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pelaksanaan Rencana Aksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertujuan membenahi tata cara perencanaan, program, dan penganggaran pengembangan infrastruktur wilayah PUPR.

"BPIW diharapkan bisa memberikan arah kebijakan program unit organisasi (unor) di lingkungan PUPR untuk mendukung kawasan-kawasan maupun sektor-sektor strategis nasional secara terpadu yang mampu mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi wilayah untuk kesejahteraan

Sasaran Strategis BPIW:



masyarakat pada satu sisi, dan mengendalikan kerusakan lingkungan bagi keberlanjutan pembangunan pada sisi lain," ujar Firman.

Disamping itu, agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan APBN yang semakin terbatas, BPIW diharapkan mampu mengupayakan program-program infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Permen 21 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU diharapkan dapat mendukung pelaksanaan usulan program infrastruktur PUPR untuk diwujudkan. Jadi melalui KPBU ini pemanfaatan APBN untuk pembangunan program infrastruktur PUPR dapat lebih dioptimalkan," tutur Firman.

Nantinya juga akan diperjelas mengenai prinsip-prinsip

Agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan APBN yang semakin terbatas, BPIW diharapkan mampu mengupayakan program-program infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)



Gambar Plaza, Iconic Landmark, dan Assembly Point di Rest Area Terpadu Trenggalek Jawa Timur.

Sumber: BPIW

Disaat yang tepat, BPIW akan menjabarkan arahan kebijakan pembangunan wilayah dan memprioritaskan pembangunan beberapa infrastruktur yang akan dibangun untuk peningkatan perekonomian nasional.

kewilayahan yang menjadi basis perencanaan. Untuk periode 2020-2024, BPIW akan konsisten melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengamanatkan untuk tidak mengabaikan undang-undang yang berlaku.

“Perencanaan program pembangunan kita harus berbasis rencana tata ruang wilayah yang memiliki fokus tematik kawasan. Jadi kita fokus kesana. Kita juga melaksanakan direktif Presiden seperti program strategis nasional yang diarahkan selaras dengan kebijakan penataan ruang nasional

sesuai peraturan-peraturan yang ada,” ungkap Firman.

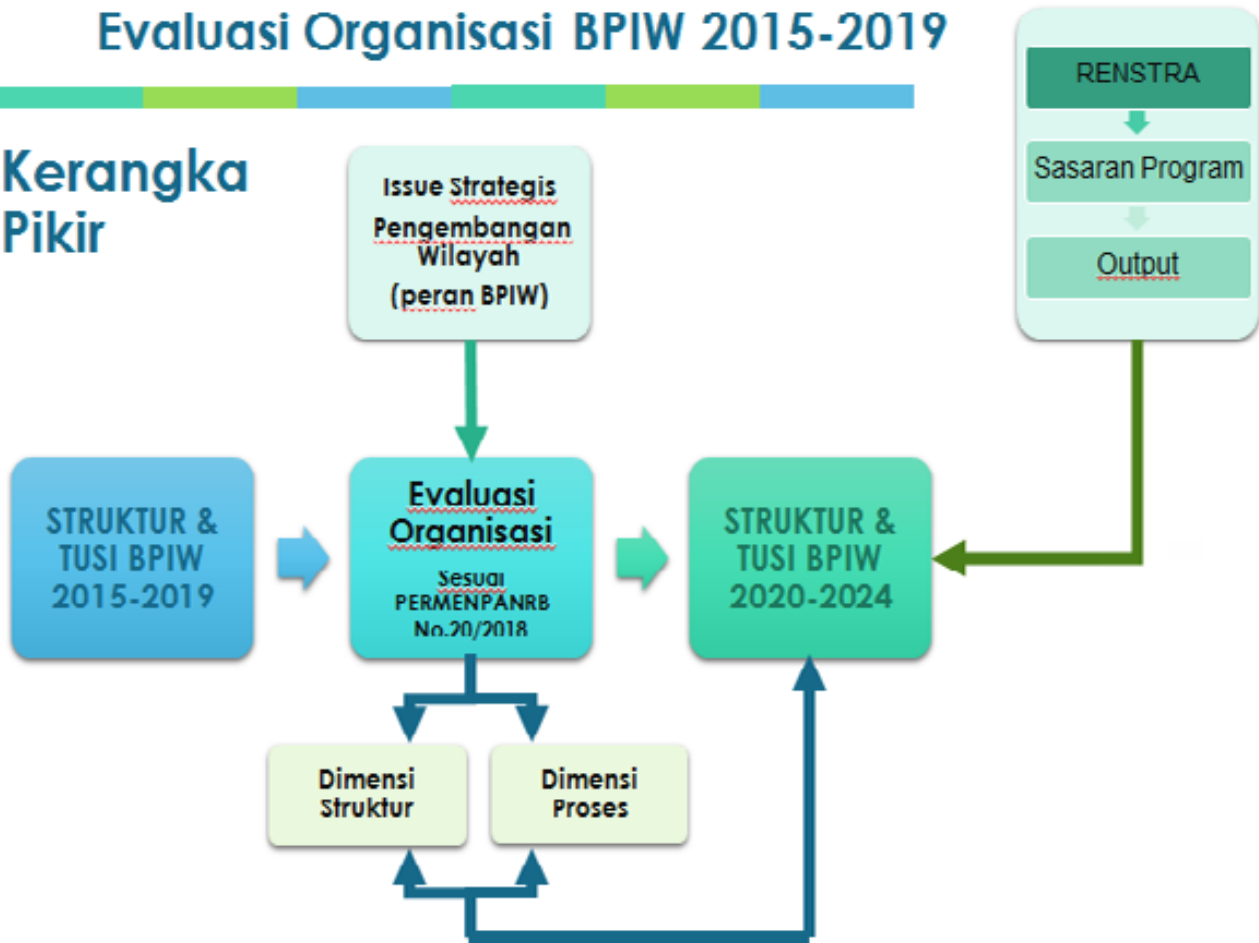
Disaat yang tepat, BPIW akan menjabarkan arahan kebijakan pembangunan wilayah dan memprioritaskan pembangunan beberapa infrastruktur yang akan dibangun untuk peningkatan perekonomian nasional.

Diusulkan Delapan Output

Pada 2020-2024, *output* BPIW diusulkan ada delapan yakni Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR Jangka Panjang (RPIJP) dan Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR Jangka Menengah (RPIJM), yang telah

Evaluasi Organisasi BPIW 2015-2019

Kerangka Pikir



memperhitungkan kebutuhan dan skema pembiayaan Infrastruktur PUPR dimaksud. Selain itu Renstra PUPR, Renstra BPIW, Rumusan Program dan Pembiayaan Tahunan, Monitoring dan Evaluasi (*Output*), serta Evaluasi Manfaat (*Outcome*).

Masing-masing *output* tersebut nantinya ada penanggung jawabnya dari masing-masing unit organisasi yang menyiapkan *database* dan standar prosedur terkait *output* tersebut.

Standar yang dibuat tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen yang dibuat BPIW tersebut memberikan arahan terhadap pengembangan pulau, kawasan-kawasan, dan kota.

Dari beberapa arahan tersebut, kemudian dikelompokan per provinsi.

Selanjutnya, rencana tindak lanjut dari kegiatan penajaman ini adalah rancangan tugas dan fungsi BPIW. Rencana tindak lanjut lainnya, berupa rancangan struktur organisasi dengan pertimbangan berdasarkan beban kerja, baik antar unit kerja eselon III maupun antar unit kerja eselon IV.

Dengan upaya yang dilakukan tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran strategis Kementerian PUPR terkait BPIW untuk periode 2020-2024 yakni tersedianya Arahan Kebijakan Perencanaan dan Pembiayaan Infrastruktur sektor PUPR. **(Redaksi)**

Rencana tindak lanjut dari kegiatan penajaman ini adalah rancangan tugas dan fungsi BPIW. Rencana tindak lanjut lainnya, berupa rancangan struktur organisasi dengan pertimbangan berdasarkan beban kerja.

BPIW *Think Tank* Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur



Ir. Sugiyantoro, MIP

Pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK-ITB, dan sekaligus Perencana Wilayah dan Kota (Planolog).

BPIW mempunyai potensi sangat strategis, tidak hanya bagi Kementerian PUPR, tetapi juga bagi negara. Hal ini karena posisinya sebagai *think tank* dalam pemikiran dan terobosan mengenai pengembangan wilayah dan infrastruktur negara. Bahkan sebenarnya tingkat kepentingannya tidak lagi setara badan di dalam kementerian, melainkan melewati sekat lintas kementerian.

Pasalnya tidak ada lagi badan lain yang memikirkan infrastruktur ke-PUPR-an sedalam seperti yang seharusnya dilakukan oleh BPIW. Inovasi dan kreativitas pemikiran BPIW menjadi pertimbangan utama bagi Kementerian PUPR dalam mengusulkan dan mengeksekusi pembangunan infrastruktur.

Sejak periode 1990-an sebenarnya terobosan pemikiran mengenai pengembangan wilayah ada

dalam situasi kebimbangan. Sampai kemudian muncul terobosan bagaimana sistem produksi dapat dilakukan. Model ini diusulkan oleh Michael E. Porter di awal 1990-an melalui konsep *industrial cluster*, yang kemudian mengubah pola produksi di dunia. Mungkin Porter bukan orang pertama yang mengusulkan, tetapi konsep yang dilakukannya telah diadopsi dan mengubah kebijakan banyak negara di dunia dalam pengembangan wilayahnya.

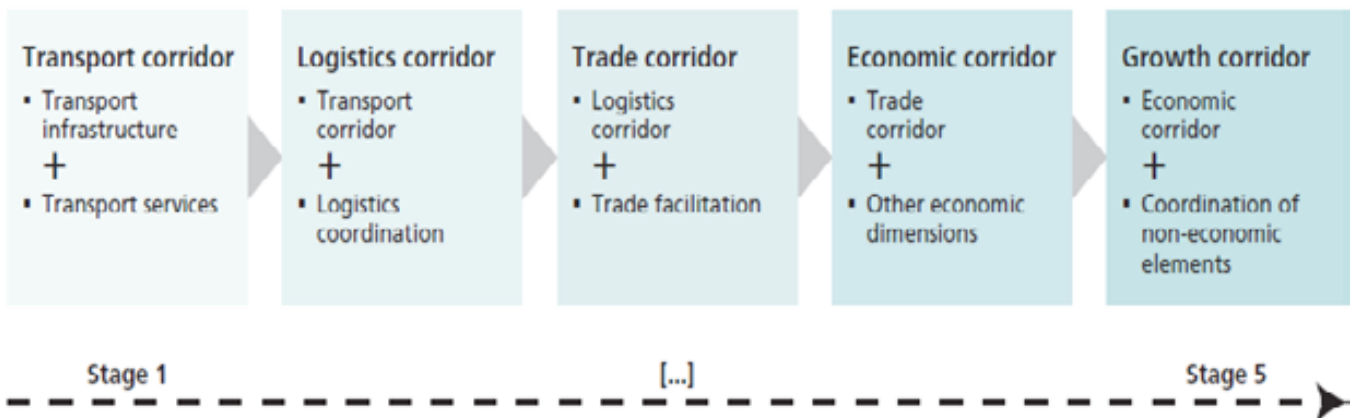
Hal ini menjadi kunci daya saing negara-negara di dunia antara lain negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *European Union* (EU). Salah satu basis teori yang kemudian ditinggalkan karena dianggap sudah usang adalah teori kutub-kutub pertumbuhan (*growth pole theory*)-nya Francois Perroux (1955).

Perbedaan mendasar keduanya adalah dalam cara wilayah memproduksi. Dalam *growth pole theory* perkembangan ekonomi atau pertumbuhan dianggap tidak seragam (*uniform*) di keseluruhan wilayah, melainkan terkumpul di lokasi tertentu (*poles*). Selain itu harapan adanya efek menetes terhadap wilayah di sekitarnya ternyata tidak kejadian.

Sebaliknya, dalam *industrial cluster*, perkembangan wilayah menjadi sangat *competitive* karena *cluster* kegiatan produksi dapat dilakukan di mana saja dalam wilayah, pulau atau kontinen, bahkan sampai lintas negara. Jarak tidak menjadi masalah selama infrastruktur pergerakan barang mendukung.

Indonesia dan beberapa negara ASEAN telah ikut mendiskusikan bersama China mengenai *Global Maritime Fulcrum Belt and Road Initiatives* (GMF-BRI). Penjelasan di atas memperkuat tren kebijakan negara-negara di dunia saat ini bahwa perdagangan dunia dan pola produksi akan sangat berdasar pada pengembangan wilayah dengan prinsip-prinsip pengembangan koridor.

Pada awal dibentuknya, BPIW telah mengambil posisi untuk mengembangkan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dan ada 35 WPS di seluruh Indonesia yang dicoba dikembangkan. Basis pertimbangan teori waktu itu adalah perkembangan koridor seperti yang dicetuskan oleh Nogales (2014),



Gambar 1. Potential development path for corridors (Nogales, 2014)

Hanya saja di sini ada peran negara yang cukup signifikan di dalam pengembangan kebijakan industri dan pembangunan perwilayahan, serta infrastruktur.

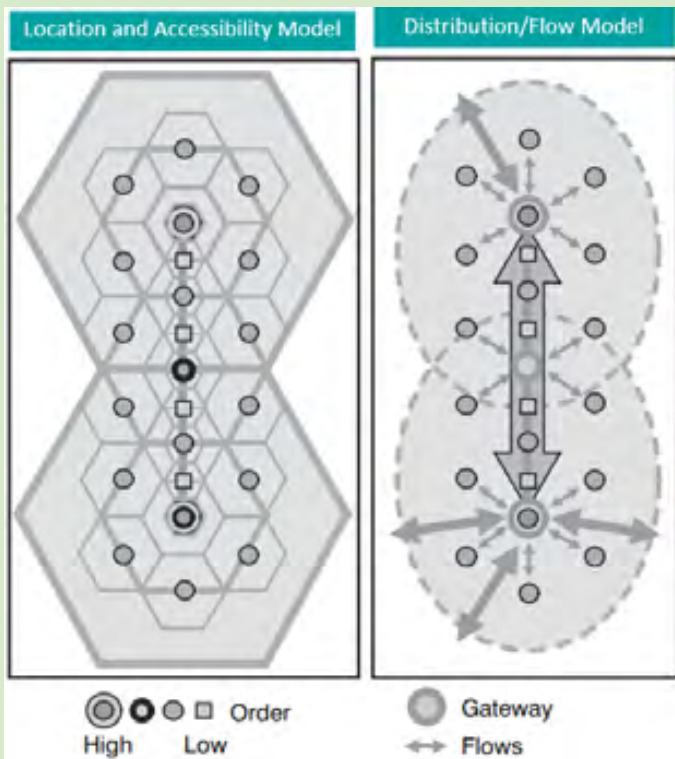
Sejalan dengan perubahan teori dan kebijakan pengembangan wilayah, ada hal-hal yang relatif tidak berubah, yaitu posisi geografis negara-negara di dunia. Posisi geografis ini telah menjadi salah satu pendorong dalam perubahan ekonomi geografi hampir dalam dua puluh tahun terakhir.

Dalam hal ini promotor dominan adalah China yang telah mengembangkan pengembangan koridor ekonomi dalam program *One Belt One Road* (OBOR). Program ini telah diadopsi dan diterapkan oleh beberapa negara di sekitar China yang umumnya berkarakter kontinen. Khusus untuk negara kepulauan, sejak tahun April 2019,

yang dikombinasikan dengan *urban-urban* dan *urban rural linkages*, serta basis sebaran *cluster* produksi industri.

Pada Gambar 1 diatas menunjukkan *cluster* ini sebenarnya mengikuti kebijakan pengembangan kawasan ekonomi, baik KEK (ada lebih dari 20 kawasan), KE (ada 14 kawasan), maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam bentuk PSN. Didukung dengan terbitnya PP 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebenarnya BPIW telah mempunyai instrumen yang cukup lengkap untuk berinovasi-kreasi maupun melayani kebijakan nasional yang berkarakter strategis.

Dengan kebijakan pembangunan jaringan jalan tol dan kebijakan tol laut oleh Pemerintah, sebenarnya semakin menguatkan *positioning*



Gambar 2. Location and Accessibility Model & Distribution/Flow Model (Rodrigue, et.al, 2006)

Pada gambar 2 disamping ini dapat digambarkan bahwa, wujud akhir dari terbangunnya infrastruktur ini akan dapat masuk ke dalam paradigma terakhir mengenai karakter transport koridor dan struktur spasial wilayah, yaitu paradigma distribusi/flow model (Rodrigue et.al., 2006). Paradigma ini telah meninggalkan jauh karakter sistem perkotaan dan *central places theory* yang berbasis pada urban *hierarchy/* orde pelayanan dan fungsi (Christaller, 1933). Pada model ini, disebut sebagai, *location and accessibility* model, fungsi koridor hanya untuk struktur yang mengorganisasikan interaksi di dalam *hierarchy*.

arah kebijakan pemerintah untuk melakukan redefinisi struktur spasial wilayah pulau dan kepulauan.

Sedikit banyak, Sistem Perkotaan Nasional di dalam Rencana Struktur Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan kita masih berbasis pada model Christaller ini (1993), meskipun karakter fungsi transport koridor juga sudah menonjol.

Sedikit banyak pula, *positioning* kebijakan BPIW dengan WPS-nya telah menyadari adanya fungsi koridor regional yang berbasis paradigma distribusi/flow model, di mana syarat adanya *major gateway* yang berfungsi sebagai *interface* utama antara sistem global, national, dan regional telah terpenuhi.

Kelemahan WPS adalah diposisikan sebagai semacam payung pengembangan wilayah seperti halnya penataan ruang. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan oleh banyak Kementerian/ Lembaga dan daerah mengenai konsistensi

hukum dari produk-produk kebijakan nasional dan perencanaannya. Hal semacam ini dapat dikembalikan lagi ke posisi SPIP yang mengamanatkan adanya konsistensi aturan-aturan sistem kebijakan dan strategi nasional, termasuk produk-produk rencana Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Pada paruh waktu kedua perjalanan BPIW, pemahaman mengenai WPS telah bergeser dan diinterpretasikan sebagai "arahan alokasi program dan pembiayaan investasi infrastruktur". Hal ini tidak lagi dianggap sebagai sebuah *masterplan* yang *independent* dalam konteks nasional.

Sebenarnya rencana pengembangan wilayah telah ditetapkan melalui perintah perencanaan RTR Nasional, Pulau dan Kepulauan, di mana di dalamnya terdapat sebaran lokasi KSN, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), dan rencana strategis nasional lainnya. Tantangan BPIW



Keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR rutin dilakukan melalui Konsultasi Regional

Sumber: BPIW

ke depan dalam periode 2020-2024 akan semakin berat, karena BPIW menjadi rujukan bagi unit organisasi (unor) dalam melakukan eksekusi pembangunan infrastruktur. Sementara terobosan inovasi dalam pengembangan infrastruktur wilayah termasuk sumber dan mekanisme pembiayaan masih harus dilakukan.

Dalam hal ini BPIW disarankan melakukan tiga hal, yaitu revitalisasi organisasi internal, reposisi fungsi dan peran dalam lingkup Kementerian PUPR, dan *refocusing business model*. Revitalisasi dapat dilakukan dengan mereview posisi, tugas dan fungsi Pusat-Pusat dalam BPIW. Termasuk dalam hal ini adalah standar produk-produk BPIW. Reposisi fungsi dan peran dilakukan dengan memperhatikan relasi tugas dan fungsi dengan unor lain.

Refocusing business model dilakukan pada pengembangan infrastruktur wilayah dengan berbasis pada konsep pengembangan wilayah yang tepat dan disesuaikan dengan arah perkembangan trend global dan regional, serta

menyesuaikan terhadap situasi lokal. Hal ini harus diimbangi dua hal, pertama penguatan SDM secara berjenjang, dan kedua penguatan dalam sistem 'penyimpanan' dari akumulasi pengetahuan, aspek teknis, data, dan peta yang seharusnya *accessible* ke semua *stakeholders* di dalam Kementerian PUPR.

Semoga dalam lima tahun kedua ini BPIW dapat ber-evolusi menjadi badan yang semakin disegani dan dihormati, serta menelurkan ide-ide cemerlang untuk pembangunan bangsa.

Produk BPIW Menjadi Rujukan Semua Sektor



Ir. Asep Arofah Permana, M.M., M.T.

Kepala Biro Kepegawaian dan Tata Laksana
Setjen Kementerian PUPR.

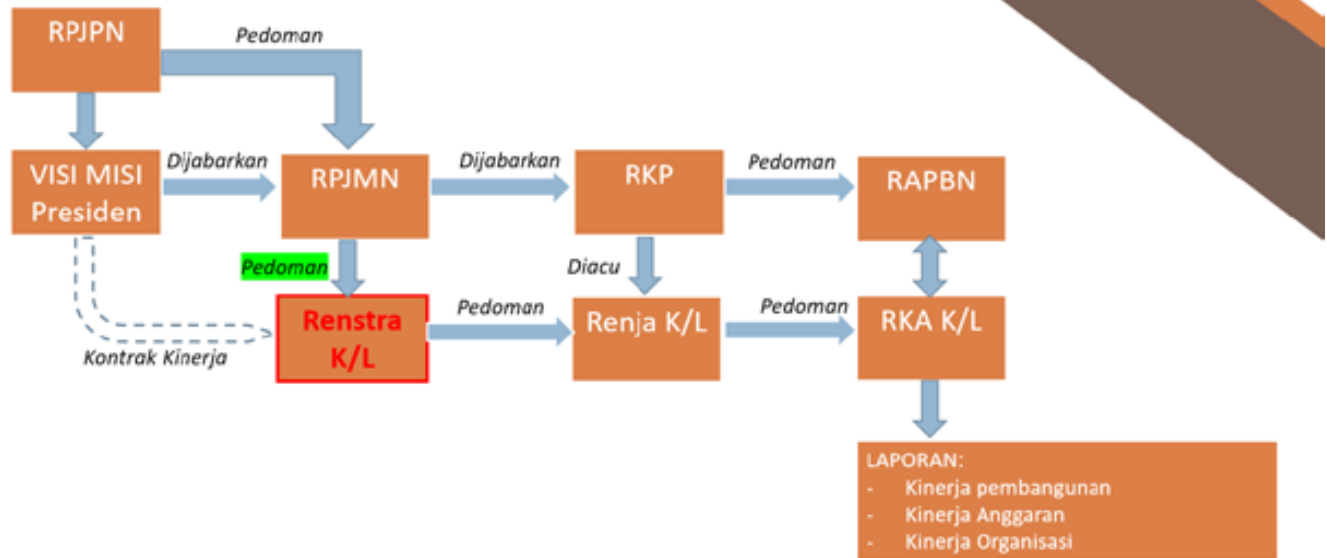
Penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan Rakyat yang menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2015, berimplikasi pada perubahan struktur organisasi. Contohnya, Tata Ruang tidak lagi bergabung dengan Kementerian PUPR namun masuk pada organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dampak dari perubahan itu, Kementerian PUPR memerlukan unit yang dapat mengintegrasikan perencanaan seluruh infrastruktur PUPR dalam suatu kawasan atau wilayah, sehingga kawasan tersebut dapat berkembang. Setelah pembahasan panjang, akhirnya pada tahun 2015, dibentuklah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategis keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang PUPR. Unit Organisasi BPIW diharapkan dapat memberikan arah kepada Direktorat Jenderal sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan infrastruktur di suatu kawasan atau wilayah.

Dalam menjalankan tugasnya, BPIW melakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur di suatu kawasan atau wilayah bersama-sama dengan seluruh unit organisasi utama (direktorat jenderal) di Kementerian PUPR, selanjutnya masing-masing direktorat jenderal menindaklanjutinya dengan menyiapkan rencana dan program pembangunan infrastruktur masing-masing sektor untuk mengisi kawasan/wilayah tersebut.

Kedudukan Renstra



Permen Bappenas No. 5/2014 ttg Pedoman Penyusunan Renstra

5

Hal inilah yang menjadi konsep dasar pembentukan BPIW, walaupun belum dapat berjalan sepenuhnya. Namun demikian, kedepan diharapkan BPIW dapat mengoptimalkan perannya sebagai mitra bagi direktorat jenderal sebagai sektor yang mengisi kawasan/wilayah dengan mengacu pada produk-produk yang dihasilkan BPIW seperti, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR maupun hasil reviewnya.

Dengan demikian, yang menjadi tantangan adalah memastikan agar BPIW berperan sebagai penggerak (*leading sector*) bagi seluruh unit organisasi di Kementerian PUPR, khususnya direktorat jenderal. Sehingga direktorat jenderal dapat membangun infrastruktur sesuai sektornya berdasarkan 'skenario' pembangunan yang dirancang BPIW pada suatu kawasan/wilayah. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan pemahaman tentang wawasan makro yang komprehensif tentang pengembangan kawasan/wilayah, kelembagaan yang tepat dan solid, serta kepemimpinan yang kuat.

Kabinet baru periode 2020-2024 akan segera dibentuk, momentum ini diharapkan dapat dijadikan kesempatan untuk melakukan

evaluasi internal dalam rangka penguatan peran BPIW tentang efektivitas kelembagaan yang ada saat ini. Misalnya pembagian unit kerja berdasarkan fungsi-fungsi kesekretariatan, perencanaan, pemrograman, serta pelaksanaan di kawasan strategis dan kawasan perkotaan apakah sudah menampung peran yang menjadi tuntutan kementerian?. Forum evaluasi sebelum terbentuknya kabinet baru akan sangat bermanfaat guna memberikan masukan pada saat penataan organisasi Kementerian PUPR.

Jika mengacu pada kaidah kelembagaan, pembagian unit kerja dapat didasarkan pada proses maupun produk/hasil. BPIW dirancang menggabungkan keduanya yaitu berdasarkan proses untuk fungsi perencanaan dan pemrograman serta berdasarkan produk untuk fungsi pelaksanaan di kawasan strategis di kawasan perkotaan.

Dalam operasionalnya pembagian peran kelembagaan berdasarkan proses dan produk sekaligus dapat berdampak pada persoalan efektivitas tugas organisasi, yaitu khususnya pada fungsi pelaksanaan yang menangani kawasan strategis dan kawasan perkotaan. Pembagian semacam ini menjadi kurang jelas, mengingat di dalam kawasan strategis juga ada

Produk Sekretariat dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPIW



kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan ada duplikasi penanganan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul beberapa gagasan penguatan kelembagaan BPIW, yaitu pertama, tetap menggunakan pola kombinasi yang membagi organisasi berdasarkan proses dan *output* sekaligus, namun harus memisahkan antara fungsi perencanaan dan pemrograman dengan pola proses. Sedangkan fungsi pelaksanaan menggunakan pola *output* yang berbasis wilayah (barat, tengah, dan timur).

Kedua, membagi organisasi berdasarkan *output* saja yang diwujudkan dalam wilayah yang akan ditangani, yakni wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Pola semacam ini akan menuntaskan peran kelembagaan dalam satu unit kerja saja yang menangani fungsi perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan.

Apapun pola yang akan ditetapkan, merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan, sedangkan strategi lainnya bisa dalam bentuk apa saja yang paling dapat efektif untuk dilaksanakan. Melalui evaluasi dan penataan

kembali kelembagaan BPIW, kita berharap produk-produk yang dihasilkan dapat menjadi rujukan dan arahan bagi semua sektor di lingkungan Kementerian PUPR maupun instansi lain dalam mengembangkan kawasan/wilayah melalui pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal lain yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran kelembagaan adalah dengan memperkenalkan produk-produk perencanaan dan pemrograman yang dihasilkan, baik dalam bentuk pengaturan keterpaduan antar unit organisasi yang menangani infrastruktur sektor PUPR maupun produk hasil kajian yang terkait politik anggaran, politik kawasan, dan lingkungan maupun yang lainnya.

Hal ini perlu dilakukan agar peran BPIW dapat dirasakan sebagai pemadu pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR juga menjadi rujukan dalam menghitung jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur di sebuah kawasan/wilayah.



Sumber: Istimewa

Selain memberikan informasi kepada lingkungan kementerian, masyarakat pun perlu difasilitasi untuk mendapat akses guna memperoleh informasi serupa dengan cara yang berbeda, misalnya melalui iklan layanan masyarakat atau iklan pendek yang memberikan informasi tentang Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan lain sebagainya.

Penguatan peran kelembagaan, juga dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar peraturan, kebijakan, sampai dengan direktif Presiden yang bersesuaian dapat mejadi *input* yang sangat berarti bagi penguatan peran kelembagaan BPIW.

Pada akhirnya sebaik apapun bentuk kelembagaan yang dirancang, perlu dukungan sumber daya manusia yang memadai. Untuk mendukung peran hal tersebut dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai tugasnya serta telah berpengalaman. BPIW akan lebih

kuat bila lebih banyak didukung sumber daya manusia yang memiliki pengalaman di beberapa sektor beragam, seperti dari Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan. Mereka dapat mengaplikasikan pengalaman yang dimiliki pada masing-masing sektor untuk diimplementasikan dalam perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur wilayah.

Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan SDM di BPIW perlu dilakukan dengan melakukan kombinasi melalui rekrutmen pegawai baru untuk mengisi regenerasi dari awal sekitar 30 persen, serta rekrutmen SDM berpengalaman melalui rotasi dari unit organisasi sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR sekitar 70 persen. Semua upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang tepat yakni dengan menyesuaikan dengan desain organisasi yang ditetapkan.

Peran BPIW dalam Mengawal Perencanaan Pembangunan PUPR Perlu Lebih Dimaksimalkan



Dr. Ir. Danis .H. Sumadilaga, M.Eng. Sc

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR

Dalam kurun waktu 2015-2019, BPIW banyak menghasilkan produk-produk yang cukup baik dan mampu menjadi instrumen keterpaduan perencanaan dan program pembangunan infrastruktur antar unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR.

Namun, tindak lanjut dari produk yang telah disusun semestinya dapat sepenuhnya diimplementasikan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan sektoral. Contohnya terkait penyusunan Wilayah Pengembangan Infrastruktur Wilayah (WPS) Kementerian PUPR yang seharusnya menjadi konsideran dalam penyusunan perencanaan sektoral.

Penyusunan program kegiatan yang dilakukan BPIW mengacu pada WPS

tersebut dengan pendekatan spasial. Namun di sisi lain, unor-unor khususnya Dirjen Cipta Karya juga memiliki arah kebijakan internal salah satunya menyusun prioritas penanganan melalui klasterisasi, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan program kegiatan yang akan direncanakan.

Dengan usianya yang sudah lima tahun, peran BPIW dalam mengawal perencanaan pembangunan PUPR perlu lebih dimaksimalkan, terutama terkait *baseline* data yang digunakan agar lebih akurat. Selain itu penggunaan data dan informasi perlu konsisten agar dapat memudahkan dalam proses sinkronisasi program.

Untuk itu BPIW perlu lebih responsif dengan dinamika kegiatan di Cipta Karya. Dalam



melakukan evaluasi diperlukan *baseline* data yang akurat supaya sejalan dengan target capaian unor.

Terkait penetapan *baseline* data, saya menyarankan agar data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan dan program didasarkan pada konsensus bersama. Selain itu, koordinasi harus terus dilakukan, antara BPIW dan unor lain dalam setiap perubahan atau perkembangan dalam proses penyusunan perencanaan dan program.

Sehubungan dengan penguatan organisasi yang dilakukan BPIW untuk 2020-2024, maka yang perlu ditingkatkan adalah komitmen sebagai *leading sector* yang mampu mengakomodir usulan dan memberikan masukan terhadap perencanaan dan program dari unor di lingkungan Kementerian PUPR. Selain itu, penggunaan data dan informasi yang akurat dan "Satu Pintu" yakni melalui Pusat

Data dan Informasi (Pusdatin) atau Biro Komunikasi Publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif (spasial dan sektoral). Selain itu, perlu dilakukan peningkatan fungsi koordinasi antar unor dalam proses penyusunan perencanaan dan program.

Diharapkan kedepan BPIW dapat meningkatkan kemampuan menjadi *leading sector* dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR. Sejauh ini, peran yang terlihat dari BPIW dalam hal perencanaan dan pemrograman melalui kegiatan Konsultasi Regional tiap tahunnya.

BPIW diharapkan juga melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada unor di lingkungan Kementerian PUPR. Pemantauan dan evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program kegiatan selanjutnya.



Pengembangan Wilayah Butuh Penguatan Sinergi Pembangunan

Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D

.....
*Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D dan timnya, diberi amanah untuk memastikan pembangunan sektor sesuai dengan masalah wilayah yang ada. Tentunya hal itu bukan pekerjaan yang tak mudah, karena memerlukan penguatan sinergi pembangunan pusat dan daerah sehingga berbagai program dan kegiatan pembangunan akan selaras dan sejalan. Seperti apa strategi yang diterapkan Rudy dan tim dalam menghadapi tantangan ini?, dan bagaimana pula pandangannya terhadap koordinasi dengan BPIW Kementerian PUPR selama ini?. Berikut penuturannya saat diwawancarai “Buletin Sinergi” beberapa waktu yang lalu:

Apa yang menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengembangan Regional ini?

Tugas dan fungsi kita adalah semua hal yang terkait pengembangan wilayah. Intinya adalah bagaimana memastikan pembangunan sektor itu sesuai dengan masalah wilayah yang ada. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan, Deputi Bidang Pengembangan Regional mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro regional, serta pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang regional.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, kami menjalankan delapan fungsi. Beberapa diantaranya adalah pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kerangka ekonomi makro regional, serta perencanaan

pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan regional.

Kemudian pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan regional. Fungsi lainnya adalah penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan regional dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah.

Selain itu, apalagi yang menjadi tugas Bapak dan tim?

Kami melakukan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengembangan regional.

Tugas selanjutnya adalah pengoordinasian kelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan

"Tugas dan fungsi kita adalah semua hal yang terkait pengembangan wilayah. Intinya adalah bagaimana memastikan pembangunan sektor itu sesuai dengan masalah wilayah yang ada".



“Yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama adalah bagaimana mensinergikan kawasan-kawasan yang telah dikembangkan sehingga dapat terintegrasi antara kawasan satu dengan lainnya”.

kegiatan pembangunan di bidang pengembangan regional.

Kemudian ada tugas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan regional.

Kami juga melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan regional, dan pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/ Kepala Bappenas).

Tugas-tugas lainnya sesuai arahan pimpinan seperti penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Sulawesi Tengah yang merupakan penugasan Wakil Presiden. Kemudian juga penyiapan rajian Ibu Kota Negara yang merupakan penajaman dari Presiden kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Program/kebijakan apa yang telah diinisiasi?

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah RPJMN 2015-2019, bidang kami sangat terkait dalam upaya-upaya mewujudkan Nawacita, pertama, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal ini bertujuan untuk mencapai desentralisasi yang produktif, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan penanggulangan kemiskinan.

Kami berupaya mewujudkan Nawacita yang kedua yakni “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya”.

Hal ini untuk mewujudkan konektivitas nasional untuk keseimbangan pembangunan nasional, terbangunnya

sarana dan prasarana dasar, transportasi umum, massal, dan perkotaan, penguatan investasi termasuk dengan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan non anggaran pemerintah, pelibatan BUMN sebagai agen pembangunan, peningkatan kapasitas inovasi, teknologi, dan perdagangan, serta daya saing tenaga kerja.

Tidak hanya itu, kami juga ditugaskan untuk menjalankan Nawacita yang ketiga yakni “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Hal itu untuk mencapai kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan manajemen risiko bencana, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, penguatan sistem mitigasi dan adaptasi iklim dan maritim, serta penguatan stabilitas sektor keuangan dan kapasitas fiskal negara.

Apa yang diperlukan dalam upaya mencapai Nawacita tersebut?

Diperlukan penguatan sinergi pembangunan pusat dan daerah sehingga berbagai program dan kegiatan pembangunan akan selaras dan sejalan. Untuk itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional telah memberikan arahan pembangunan wilayah melalui penyusunan RPJMN berdimensi kewilayahan yang telah diinisiasi sejak periode RPJMN 2010-2014.

Di dalam dokumen perencanaan itu, telah tertuang berbagai isu wilayah pulau, arah kebijakan, hingga strategi pembangunan yang akan menjadi landasan di dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di berbagai tingkatan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik program pembangunan infrastruktur hingga program pengembangan SDM.



Sumber: Dok. BPIW

Untuk itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional mengarahkan program dan kegiatan strategis Kementerian/ Lembaga (K/L) yang tentunya harus dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan kewilayahan.

Seperti apa strategi yang diterapkan Bappenas terkait pengembangan kawasan?

Kawasan yang telah dikembangkan di Indonesia bermacam-macam, dengan kedalaman yang berbeda-beda, seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Ada juga Kawasan Strategis Nasional (KSN) Metropolitan, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan lainnya.

Untuk itu, yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama adalah bagaimana mensinergikan kawasan-kawasan yang telah dikembangkan sehingga dapat terintegrasi antara kawasan satu dengan

lainnya. Menyikapi hal tersebut, kami telah menyusun strategi pengembangan kawasan berdasarkan karakteristiknya sehingga penanganan terhadap kawasan satu dengan lainnya dapat lebih terarah dan lebih fokus. Terdapat tiga kelompok wilayah dan kawasan yang telah kami indentifikasi, yaitu: Wilayah Maju, Wilayah Berkembang, dan Wilayah Tertinggal.

Pertama, Wilayah Maju yaitu wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, sehingga diharapkan dapat menarik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar-besarnya yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta memberikan *multiplier effect* terhadap nasional. Adapun kawasan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: KEK, KI, KPBPB, DPP dan lainnya.

Kedua, Wilayah Berkembang yaitu wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan lokal yang berpotensi ekonomi tinggi. Wilayah ini menitik beratkan pada pengembangan ekonomi lokal berbasiskan keunggulan wilayah

"Kami telah menyusun strategi pengembangan kawasan berdasarkan karakteristiknya sehingga penanganan terhadap kawasan satu dengan lainnya dapat lebih terarah dan lebih fokus".

"Strategi pembangunan kawasan dalam wilayah berkembang akan menitikberatkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal yang inklusif di seluruh wilayah".

untuk dikembangkan secara optimal dan memiliki *multiplier effect* terhadap pembangunan provinsi/kabupaten/kota seperti KPPN, SKPT, dan lainnya.

Ketiga, Wilayah Tertinggal yaitu wilayah yang memiliki karakteristik kekurangan infrastruktur dan pelayanan dasar, namun memiliki potensi yang belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal. Sebagai contoh: kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, terdepan, terluar. Untuk itu, investasi pemerintah melalui APBN dan APBD akan sangat berperan penting dalam pembangunan kawasan ini.

Ketiga wilayah tersebut tentunya diharapkan saling terintegrasi dan mendukung antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, sehingga dapat memberikan *multiplier effect*.

Apa yang menjadi strategi terkait pembangunan terhadap ketiga kelompok wilayah dan kawasan tersebut?

Strategi yang diterapkan untuk ketiganya berbeda-beda. Untuk pembangunan kawasan dalam wilayah maju, strateginya akan menitikberatkan pada peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk menarik investor pada kawasan pusat pertumbuhan,

peningkatan nilai tambah SDA untuk mendukung pengembangan kawasan, Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan kawasan.

Poin selanjutnya adalah percepatan pembangunan aksesibilitas, konektivitas, kemaritiman antar wilayah, pusat pertumbuhan dan pusat-pusat kegiatan, serta enyederhanaan regulasi dan kebijakan untuk kemudahan berusaha pada kawasan pusat pertumbuhan.

Strategi pembangunan kawasan dalam wilayah berkembang akan menitikberatkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal yang inklusif di seluruh wilayah, pengembangan *technopark* dan pemakaian teknologi tepat guna yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal pada pusat kegiatan wilayah yang potensial.

Kemudian ada penyiapan tenaga kerja lokal untuk mendukung kebutuhan pusat-pusat pertumbuhan, pengembangan UMKM dalam mendukung pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan SDM (wirausaha) dan iklim berwirausaha untuk menciptakan inovasi dan lapangan pekerjaan. Strategi pembangunan kawasan dalam



Sumber: Bappenas



Ilustrasi pengembangan wilayah

Sumber: Shutterstock

wilayah tertinggal akan menitik beratkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pelayanan dasar utamanya pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi listrik, dan perumahan permukiman. Lokus utama SPM itu pada wilayah tertinggal dan kepulauan, penyiapan modal sosial dan pengembangan SDM untuk kebutuhan pengembangan ekonomi lokal dan pusat-pusat pertumbuhan.

Selanjutnya ada penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah untuk mendukung pembangunan wilayah, serta Percepatan pembangunan aksesibilitas (darat dan laut) untuk mendukung keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan *hinterland* maupun daerah tertinggal serta pusat-pusat kegiatan.

Untuk itu peran dari BPIW akan sangat krusial untuk menjamin keterkaitan dan keterhubungan antara wilayah maju, berkembang, dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur PUPR yang terpadu.

Sebagai lembaga yang mengkoordinir perencanaan pembangunan, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan Bappenas dalam melakukan koordinasi dengan berbagai sektor?

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam lingkup nasional, Bappenas mengoordinasikan berbagai *stakeholders* melalui pelaksanaan forum-forum pembangunan maupun pelaksanaan koordinasi teknis, diantaranya Pelaksanaan Pertemuan Para Pihak (*Multilateral Meeting*), Pertemuan

Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) antara Bappenas, Mitra Kementerian/Lembaga (K/L), dan Kementerian Keuangan. Selain itu Pertemuan Dua Pihak (*Bilateral Meeting*) antara Bappenas dengan Mitra K/L.

Kemudian juga Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah (Rakortek), Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus), dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Menurut Bapak, apa yang harus menjadi perhatian BPIW dalam membuat perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR?

Deputi Bidang Pengembangan Regional telah memberikan arahan pembangunan wilayah melalui penyusunan RPJMN berdimensi kewilayahan dimana di dalam dokumen perencanaan tersebut, telah tertuang berbagai isu wilayah pulau, arah kebijakan, hingga strategi pembangunan yang akan menjadi landasan di dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

Untuk itu BPIW dapat menyusun program dan kegiatan yang berkualitas untuk menjawab kebutuhan wilayah berlandaskan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah khususnya dalam penyediaan infrastruktur PUPR yang terpadu. Sinergi antara BPIW dan Kedepuyan Bidang Pengembangan Regional perlu diperkuat sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan dan kebutuhan pembangunan wilayah prioritas. **(Hendra/Daris)**

"Sinergi antara BPIW dan Kedepuyan Bidang Pengembangan Regional perlu diperkuat sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan dan kebutuhan pembangunan wilayah prioritas".

PENYUSUNAN *MASTERPLAN, DEVELOPMENT PLAN, PRA STUDI*
KELAYAKAN, DAN PRA DESAIN PUSAT PERTUMBUHAN BARU

KPPN MUNA BARAT



Salah satu kebijakan dan strategi pembangunan desa yang termuat dalam Nawacita adalah peningkatan ketahanan ekonomi kawasan perdesaan dengan mendorong keterkaitan desa-kota secara sehat.

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Muna Barat merupakan salah satu dari 40 Pusat Pertumbuhan Baru Keterkaitan Kota – Desa dalam RPJMN 2015-2019.

Pusat pertumbuhan baru hingga tahun 2019 akan didorong perkembangannya untuk membantu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pusat pertumbuhan baru sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan yang diharapkan dapat mengangkat ekonomi di desa-desa tertinggal dan berkembang.

Dalam rangka peningkatan keterkaitan pembangunan desakota, maka tidak hanya kawasan perdesaan prioritas nasional saja yang didorong perkembangannya melainkan juga kota-kota kecil untuk menarik perkembangan desa-desa.

Penyusunan *Masterplan, Development Plan, Pra Studi Kelayakan, Dan Pra Desain Pusat Pertumbuhan Baru KPPN Muna Barat* ini




bertujuan untuk merencanakan pengembangan KPPN yang berbasis keberlanjutan, efisiensi, efektif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan dalam mengoptimalkan distribusi barang dari desa ke kota.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR) dalam rangka meningkatkan fungsi kota kecil dan KPPN sehingga secara umum memperkuat sistem keterkaitan kota-desa dan dapat menjadi stimulan bagi desa-desa berkembang dan tertinggal di sekitarnya.

Dengan tersusunnya *masterplan, development plan*, serta program tahunan pengembangan infrastruktur PUPR dan infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR) di kawasan pusat pertumbuhan baru/KPPN dan kota kecil yang terpadu antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan.

Hal itu didasari pada kebutuhan jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). (Alis/Farhan)

Kronologis Delineasi KPPN Muna Barat

	Kriteria	Indikator	Penilaian
	Keterkaitan Wilayah	Satu hamparan	<ul style="list-style-type: none"> • Delineasi awal, wilayah terpisah karena 2 desa berupa pulau • Usulan Pemkab memasukan 3 desa di daratan Kec. Maginti dan seluruh desa di Kec. Tiworo Selatan, sehingga KPPN menjadi satu hamparan.
	Keterkaitan kegiatan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kesamaan komoditas • Interaksi kuat sistem hulu-hilir komoditas 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa-desa di Kec. Tiworo Selatan dominan pertanian • Desa-desa di Kec. Maginti dominan perikanan • Kasimpa Jaya menjadi pusat distribusi komoditas pertanian & Pajala menjadi pusat pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan • Desa Bangko kembali dimasukkan pada delineasi karena terdapat pusat pengolahan perikanan
	Embrio pusat pertumbuhan baru	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pusat pelayanan dan pemasaran • Fungsi pusat pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasimpa Jaya dan Pajala merupakan IKK • Di Desa Pajala terdapat tempat pengolahan perikanan

Delineasi KPPN Muna Barat



Kabupaten Muna Barat atau disingkat **Mubar** merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemekaran dari Kabupaten Muna pada pertengahan tahun 2014. Ibu kota Kabupaten Muna Barat terletak di Laworo, Kecamatan Sawerigadi

DELINEASI BAPPENAS		
Kecamatan	Desa	Potensi Pengembangan
Maginti	Kembar Maminasa	Agropolitan
	Bangko	Agropolitan
	Pasai Padangan	Agropolitan
DELINEASI TERPILIH		
Kecamatan	Desa	Potensi Pengembangan
Maginti	Ahadi Jaya	Padi Sawah & Jagung
	Pajala	Perikanan & Kakao
	Kembar Maminasa	Perikanan, Jagung, & Kakao
	Bangko	Perikanan
Tiworo Selatan	Barakkah	Kakao, Perikanan, & Kakao
	Sangia Tiworo	Jagung & Kakao
	Kasimpa Jaya	Padi Sawah, Jagung, Kakao
	Katangana	Padi Sawah & Jagung
	Parura Jaya	Padi Sawah & Jagung



No	Desa	IPD	Klasifikasi Desa
1	Pajala	67,34	Berkembang
2	Abadi Jaya	65,85	Berkembang
3	Parura Jaya	63,66	Berkembang
4	Sangia Tiworo	60,97	Berkembang
5	Kasimpa Jaya	59,94	Berkembang
6	Barakkah	58,49	Berkembang
7	Katangana	53,49	Berkembang
8	Kembar Maminasa	51,95	Berkembang
9	Bangko	36,87	Tertinggal

KEDUDUKAN MUNA BARAT DALAM KONSTELASI REGIONAL DAN TATARAN KEBIJAKAN



Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Muna Barat Tahun 2018-2038

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN:
Kecamatan Tiworo Selatan termasuk kedalam KSK sebagai Kawasan Agropolitan

DAERAH IRIGASI KABUPATEN yaitu DI Katangana seluas 433 Ha

RENCANA STRUKTUR RUANG :

Dalam Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Muna Barat, KPPN Muna Barat yang terdiri dari Kec. Maginti dan Kec. Tiworo Selatan berada pada **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pajala**



MUNA BARAT TAHUN 2018

229 UNIT BACKLOG

Kondisi ketersediaan rumah di KPPN Muna Barat sebagai berikut: Jumlah KK: 2.562 KK
Jumlah Rumah: 2.333 unit

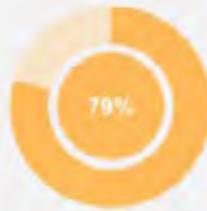
SUMBER DAYA AIR KPPN Muna Barat terbagi dalam 4 (empat) Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Katangana Bone-Bone, DAS Bonegkeputeh, DAS Kasimpa, dan DAS Tanjung. Terdapat Bendung Katangana seluas 290 Ha.



- A. Total Panjang Jalan :**
Kabupaten: 121,92 Km
Desa: 15,38 Km
Non Status: 8,3 Km
- B. Kondisi Jalan:**
- Baik: 34,65 Km
 - Rusak Ringan: 54,75 Km
 - Rusak Sedang: 51,44 Km
 - Rusak Berat: 4,76 Km



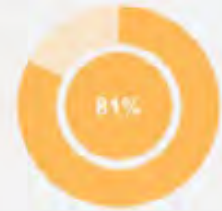
- ELEKTRIFIKASI**
Pelayanan listrik di KPPN Muna Barat terbagi sebagai berikut:
- Listrik PLN: 1.791 Rumah
 - Listrik Non PLN: 475 Rumah
 - Belum Tersambung: 84 Rumah



- AKSES AIR BERSIH**
Belum ada sistem perpipaan
- Sumur Bor: 1.578 KK
 - Sumur Bersama: 357 KK
 - Sumur Bantuan Pemerintah: 155 KK
 - Sungai: 7 KK
 - Membeli Air Jerigen: 359 KK

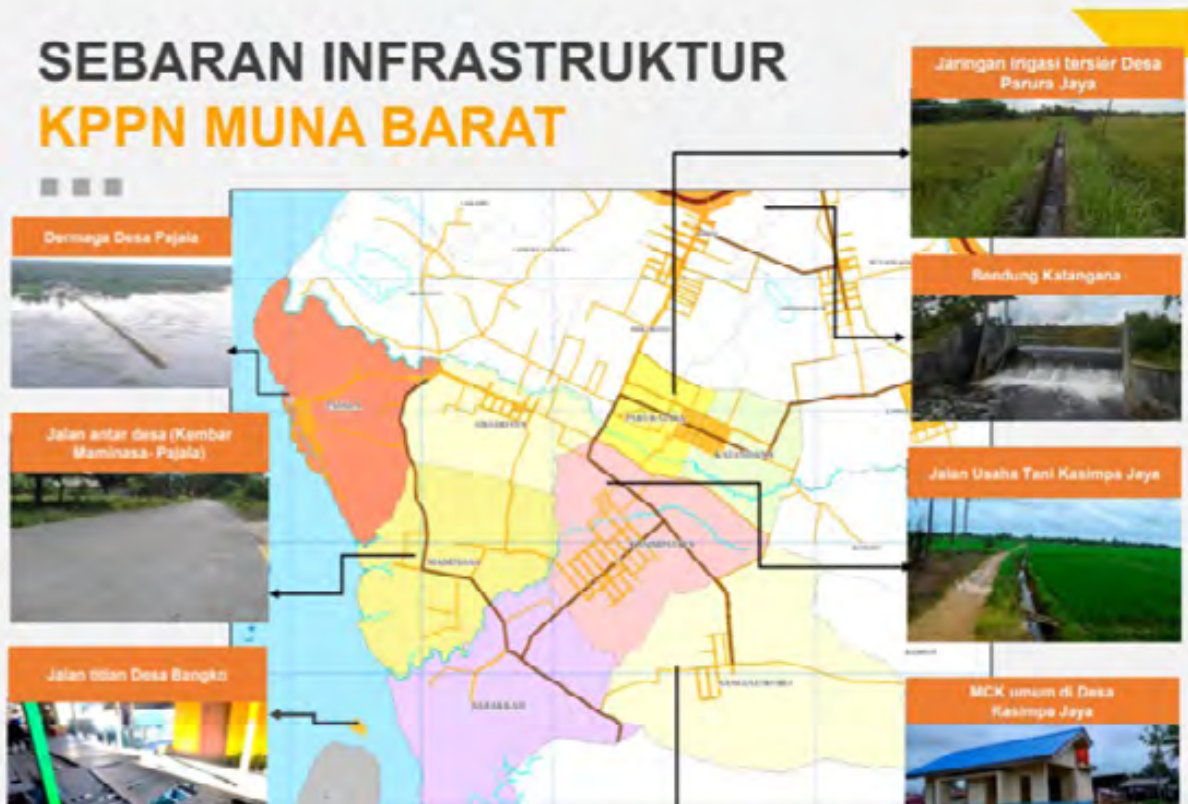


- PENGELOLAAN SAMPAH**
Belum adanya pengelolaan sampah terpadu di KPPN Muna Barat



- AKSES SANITASI**
Jenis sanitasi KPPN Muna Barat:
- Septiktank Individu: 736 KK
 - Cubluk: 1.143 KK
 - MCK Komunal: 185 KK
 - Sembarang: 498 KK

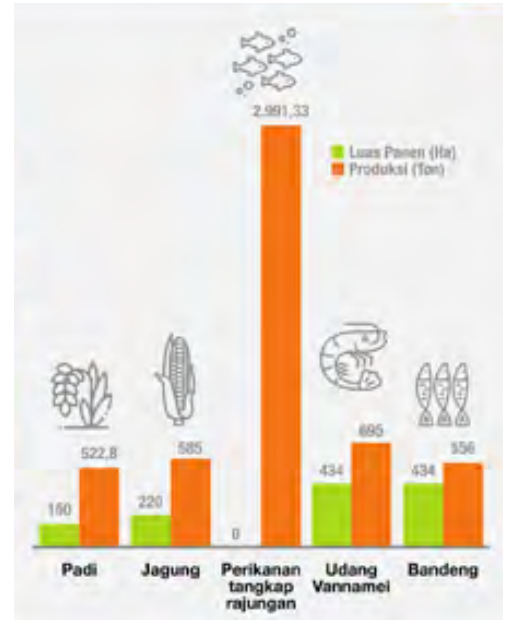
SEBARAN INFRASTRUKTUR KPPN MUNA BARAT



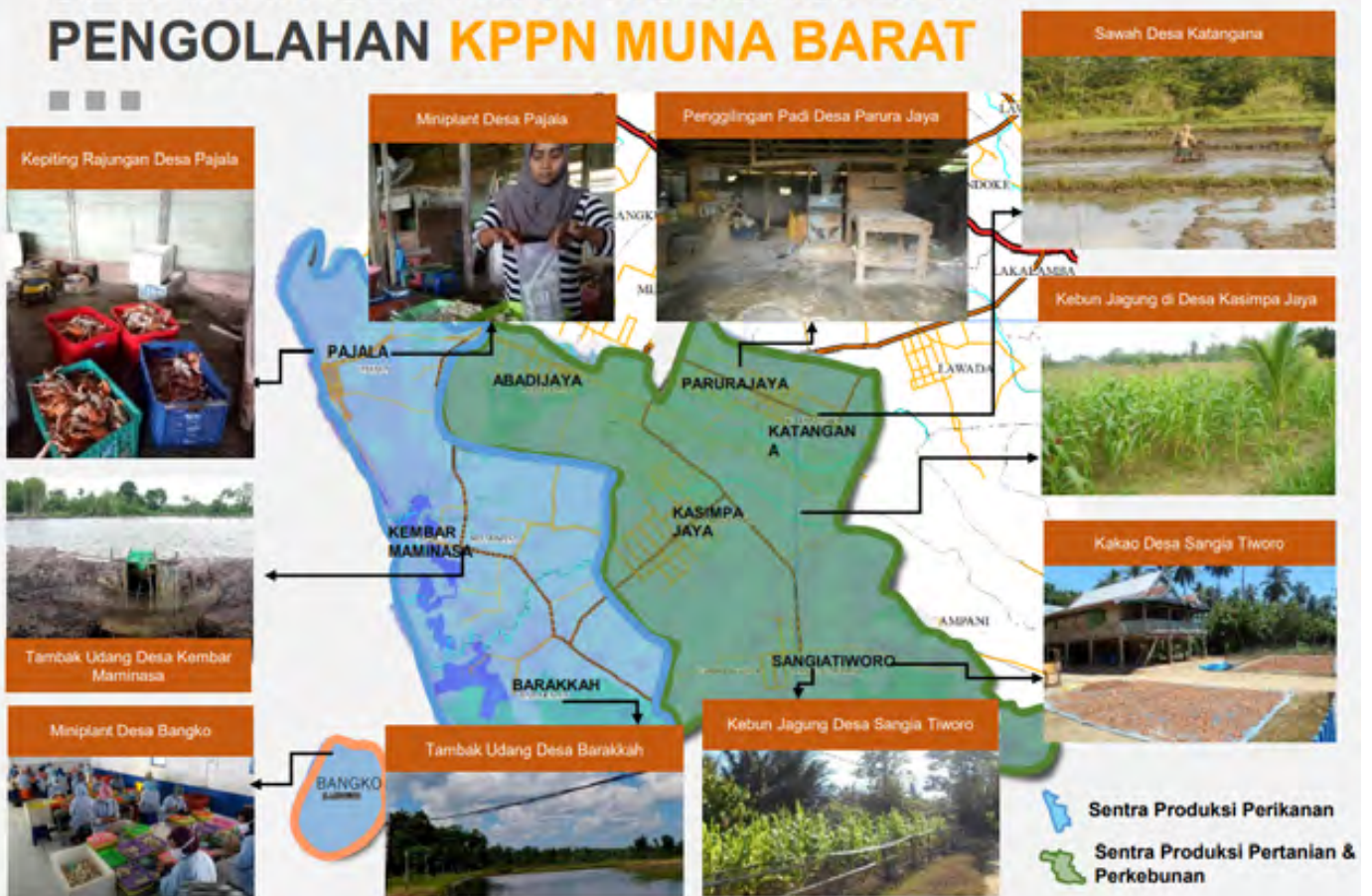
POTENSI UTAMA KPPN MUNA BARAT

Komoditas yang diusahakan di KPPN Muna Barat adalah Rajungan, Jagung, dan Udang Vannamei

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Harga Jual per Kg (Rp)	Nilai Jual (Rp)
1	Padi Subsisten	150	522.8	3,49	90% Hanya untuk konsumsi sendiri	
	Padi Dijual (10%)		52.2		8.000	417.800.000
2	Jagung	220	585	2,66	2.500	1.462.500.000
3	Perikanan tangkap (Rajungan)	-	2.991,33	-	35.000-50.000	119.653.200.000
4	Perikanan Budidaya Udang Vannamei	434	695	1,60	0.000-75.000	38.225.000.000
5	Bandeng	434	556	1,28	13.000-18.000	8.340.000.000
KPPN Muna Barat		14.302	28.128	1,97		52.831.100.000



SEBARAN SENTRA PRODUKSI DAN PENGOLAHAN KPPN MUNA BARAT





DASAR PERTIMBANGAN KONSEP PENGEMBANGAN KPPN MUNA BARAT

01 Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Penetapan Desa Kasimpa Jaya di Kecamatan Tiworo Selatan dan Desa Pajala di Kecamatan Maginti sebagai PPL
- Penetapan Kecamatan Tiworo Selatan sebagai Kawasan Agropolitan
- Penetapan Desa Pajala di Kec. Maginti sebagai *hinterland* dari *minapolis* yang berada di Tondasi

02 Isu Strategis

- KPPN Muna Barat termasuk Kawasan Strategis Kabupaten sebagai agropolitan dan minapolitan
- Memiliki potensi perikanan budidaya dan tangkap, tetapi kurang memiliki akses pemasaran, sehingga kurang memiliki nilai tambah.
- Sebagian besar desa di KPPN Muna Barat adalah eks transmigrasi dan relatif lebih berkembang dibandingkan desa lainnya di Kabupaten Muna Barat
- Memiliki potensi perikanan budidaya dan tangkap, tetapi kurang memiliki akses pemasaran

03 Konsep Agropolitan dan Minapolitan

Agropolitan

- Mendorong masyarakatnya memperoleh pendapatan dari kegiatan agribisnis
- Menciptakan kegiatan pertanian, termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, perdagangan agrobisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
- Terciptanya relasi antara kota dan daerah-daerah *hinterlandnya*. Kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya dan produk olahan skala rumah tangga, sedangkan kota menyediakan penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi pertanian.

Minapolitan

Konsep dasar pengembangan Kawasan Minapolitan adalah upaya menciptakan pembangunan *inter-regional* berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (*rural-urban linkage*) yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial.

KONSEP AGRO/MINA POLITAN

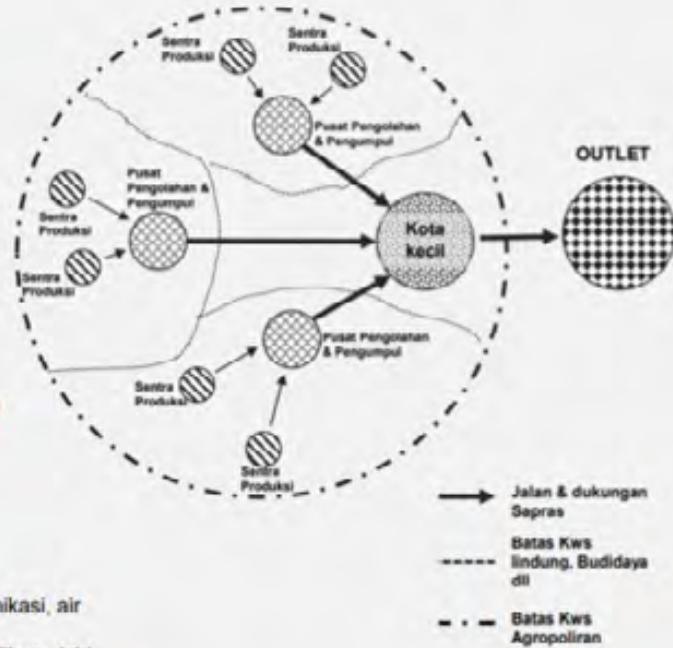


Sapras Pendukung Ideal di Sentra Produksi

- Mempunyai komoditas unggulan di sector pertanian
- Sumber bibit/benih unggul
- Jalan Usaha Tani
- Jalan Produksi tambak
- Prasarana pendukung usaha pertanian (irigasi, embung, bendung, dermaga, dll)
- Kelembagaan petani inovatif
- Pengolahan awal hasil pertanian
- Sarana kesejahteraan sosial (kesehatan, pendidikan, dsb)

Sapras Pendukung Ideal di Pusat Pengolahan

- Sarana pemasaran
- Toko saprodi
- Gudang
- Pusat pengolahan
- Lembaga Keuangan
- Kelembagaan petani (Koperasi & Asosiasi)
- Balai Penyuluhan Pertanian
- prasarana umum (transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih, dll)
- Sarana kesejahteraan sosial (kesehatan, pendidikan, dsb)



PENERAPAN KONSEP AGROMINAPOLITAN DI KPPN MUNA BARAT (2020-2024)



Rencana Pengembangan Sentra Produksi

- Peningkatan kualitas irigasi
- Penyuluhan & bimbingan teknis pada poktan, nelayan, & petambak
- Pembangunan & Peningkatan Jalan Usaha Tani
- Peningkatan Jalan produksi
- Pengadaan alat-alat
- Pengadaan kincir dan pompa tambak
- Pembangunan unit pembenihan rakyat
- Pengadaan bibit udang unggul
- Pengadaan bibit jagung unggul

Rencana Pengembangan Pusat Pengolahan Agrominapolitan

- Pembangunan toko saprodi
- Peningkatan jalan menuju pusat pengolahan
- Pembangunan pusat pengolahan terpadu
- Revitalisasi pasar Pajala
- Pembangunan jalan menuju pusat pengolahan & pengumpul
- Pembangunan pusat pengolahan dan penampungan hasil perikanan
- Fasilitas pembentukan BUMADEs
- Fasilitas pembentukan LKD
- Pembangunan pabrik es
- Pengadaan cold storage

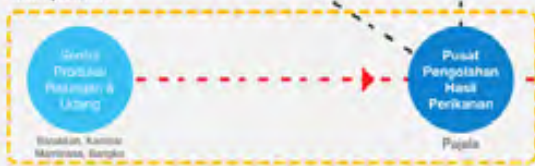
Periode Lima tahun pertama, Kasimpa jaya tumbuh sebagai pusat pengolahan komoditas pertanian dan Pajala sebagai pusat pengolahan perikanan yang berdaya saing.

PENERAPAN KONSEP AGROMINAPOLITAN DI KPPN MUNA BARAT (2025-2029)

Agropolitan



Minapolitan



Rencana Pengembangan Sentra Produksi

- Peningkatan kualitas irigasi
- Penyuluhan & bimbingan teknis pada poktan, nelayan, & petambak
- Pembangunan & Peningkatan Jalan Usaha Tani
- Peningkatan Jalan produksi
- Pengadaan alsintan
- Pengadaan kincir dan pompa tambak
- Pembangunan unit pembenihan rakyat
- Pengadaan bibit udang unggul
- Pengadaan bibit jagung unggul

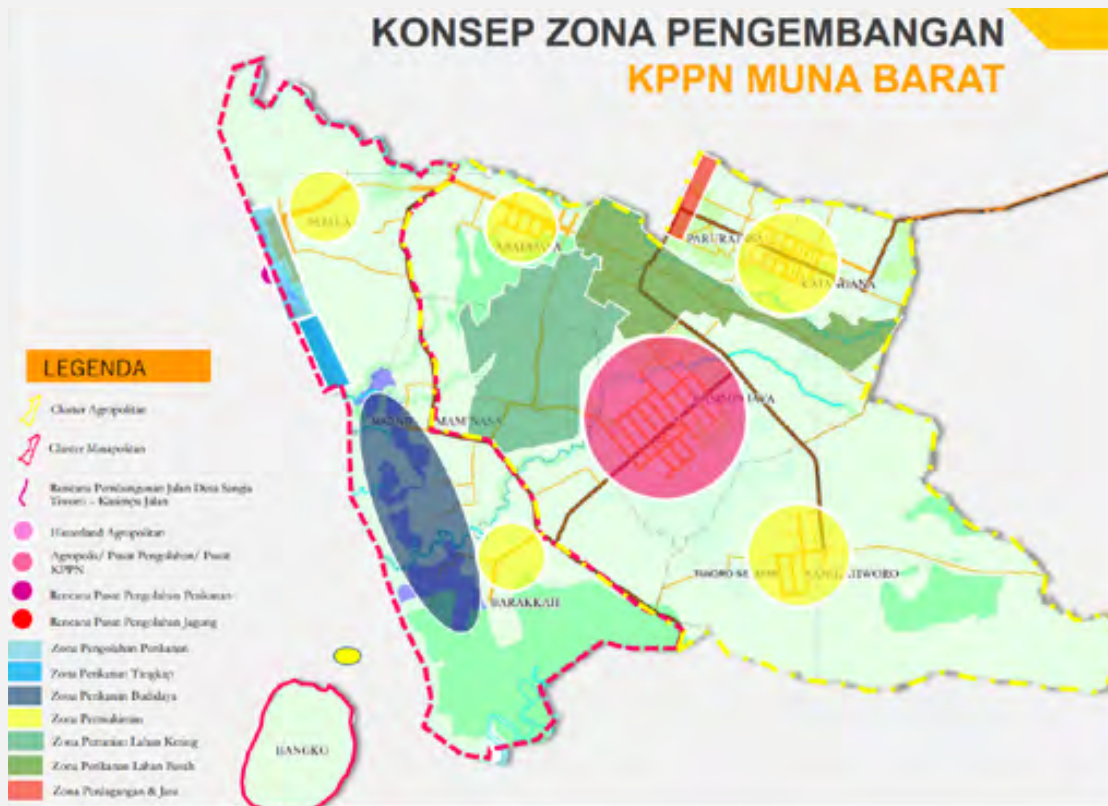
Rencana Pengembangan Pusat Pengolahan Agrominapolitan

- Pembangunan loko saprodi
- Peningkatan jalan menuju pusat pengolahan
- Pembangunan pusat pengolahan terpadu
- Revitalisasi pasar Pajala
- Pembangunan jalan menuju pusat pengolahan & pengumpul
- Pembangunan pusat pengolahan dan penampungan hasil perikanan
- Fasilitas pembentukan BUMADEs
- Fasilitas pembentukan LKD
- Pembangunan pabrik ES
- Pengadaan cold storage

Periode Lima tahun kedua, Kasimpa Jaya tumbuh sebagai kota kecil pertanian, dengan skala fungsi pelayanan kecamatan di sekitarnya

AGROMINAPOLIS MUNA BARAT





PROGRAM CLUSTER AGRO TAHUN 2020 (Tahap Persiapan)

- Pembangunan Jalan Usaha tani di Desa Abadi Jaya (Kementan) (3,7 Km Rp 1.480.000.000)
- Kemudahan pengangkutan hasil produksi pertanian ke setra produksi

- Pembangunan pusat pengolahan pertanian terpadu KPPN Muna Barat (KemerPUPR) (2 Ha Rp 5.000.000.000) Jagung apabila langsung didistribusikan ke pabrik pengolahan, akan meningkatkan margin petani sebesar 37%

- Pengadaan Mesin Pipil, Mesin Tanam Dryer, Tester Kadar Air Jagung untuk setiap poktan (Kementan) (Rp 987.000.000)
- Pengadaan alsintan untuk Meningkatkan mutu hasil produksi jagung

- Pelatihan manajerial dan pengembangan bisnis BUMDES cluster agro KPPN Muna Barat (Kemendes PDT) (Rp 350.000.000)
- Peningkatan peran Bumades sebagai lembaga pengelola pusat pertanian terpadu

- Peningkatan jalan poros KPPN Desa Sangi Tiworo dan Desa Kasimpa Jaya (KemerPUPR) (6 Km Rp 4.500.000.000)
- Meningkatkan konektivitas menuju pusat kecamatan dengan efisiensi waktu sampai 50% serta penghubung sentra produksi dan pengolahan

- Pelatihan budidaya dan pengolahan pasca panen jagung (Dinas Pertanian) (Rp 250.000.000)
- Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas jagung

Berjalan dengan Sepatu Orang Lain: Tantangan Epistemologi dalam Perencanaan Partisipatif

Karen Umemoto¹

Keragaman budaya membawa tantangan baru dalam praktik perencanaan. Dalam perencanaan partisipatif, keragaman menimbulkan tantangan, salah satunya terkait komunikasi lintas budaya. Artikel ini mengeksplorasi lima tantangan yang dihadapi perencana ketika bekerja di komunitas dengan latar belakang budaya yang beragam. Tantangan-tantangan ini adalah: (1) Melintasi bingkai penafsiran yang tertanam dalam budaya, sejarah, dan memori kolektif; (2) Menghadapi perbedaan dalam artikulasi nilai-nilai budaya dan identitas sosial; (3) Memahami beragam makna bahasa; (4) Menghormati protokol budaya dan hubungan sosial; dan (5) Memahami peran kekuasaan dalam perwujudan budaya.

Keragaman budaya di kota besar telah mengubah dunia perencanaan. Keragaman budaya juga terbukti dalam proses perencanaan, karena kini banyak perencana yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Paper ini akan menguraikan tantangan epistemologis dalam proses perencanaan partisipatif.

Lima Tantangan untuk Perencanaan Berbasis Budaya

Ada dua jenis tantangan utama yang dihadapi perencana. Yang pertama, rekonsiliasi perbedaan epistemologis antara kelompok budaya. Yang kedua berkaitan dengan kemampuan untuk mengakomodasi beragam epistemologi dalam proses perencanaan. Dalam artikel ini, penulis terutama berfokus pada yang kedua, membahas lima tantangan yang dihadapi perencana ketika bekerja di sebuah komunitas yang latar belakang budaya penghuninya beragam. Tantangan tersebut adalah:

- (1) melintasi bingkai interpretif yang tertanam dalam budaya, sejarah, dan memori kolektif;
- (2) mengkonfrontasi perbedaan dalam artikulasi nilai-nilai budaya dan identitas sosial;
- (3) memahami beragam makna bahasa;
- (4) menghormati dan menavigasi protokol budaya dan hubungan sosial; dan
- (5) memahami peran kekuasaan dalam terjemahan budaya

¹adalah salah satu penulis pada buku *Dialogues in Urban & Regional Planning*. Edited by Bruce Stiftel and Vanessa Watson.

Berikut uraian lima tantangan tersebut:

1. Melintasi bingkai interpretatif yang tertanam dalam budaya, sejarah, dan memori kolektif

Para perencana harus hati-hati saat memasuki peta sosial dan budaya masyarakat. Ketika seorang perencana memasuki suatu komunitas, ia memasuki suatu latar budaya yang bersejarah. Budaya, sejarah, dan memori kolektif membentuk kerangka interpretatif yang membentuk sebuah makna. Dalam berbagai hal, perencana dihadapkan pada tantangan untuk berinteraksi dan memfasilitasi interaksi antara individu yang melihat dunia dari lensa interpretatif yang berbeda.

Masalah sering muncul pada tahap awal interaksi. Identifikasi ras dan etnis sangat berpengaruh terhadap sentimen kepada perencana. Pada kelompok Masyarakat yang pernah menghadapi perlakuan diskriminatif/ penindasan, maka akan terjadi ketegangan ketika perencana memasuki kelompok ini. Di Amerika Serikat, ketegangan ini paling sering ditemukan ketika perencana kulit putih memasuki komunitas bukan kulit putih. Dengan wajah multikultural dari konflik perkotaan kontemporer, ketegangan ini sering juga ada di antara kelompok-kelompok bukan kulit putih.

Contohnya adalah komunitas Papakolea di Hawaii yang merupakan masyarakat khas Hawaii. Banyak tokoh penting, termasuk musisi dan seniman budaya, telah muncul dari Papakôlea. Papakolea menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, masalah kesehatan, kepadatan penduduk, dan masalah sosial ekonomi lainnya. Namun, mereka tahu bahwa lokasi mereka di kota Honolulu juga menawarkan akses yang lebih besar ke layanan sosial, pekerjaan, transportasi, lembaga pendidikan, dan fasilitas lainnya yang meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ingatan sejarah masyarakat Papakolea adalah tentang para peneliti Universitas yang memeriksa penduduk mereka

sebagai objek penelitian, namun tidak pernah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka yang diteliti. Peneliti sosial sering fokus pada masalah di masyarakat, dengan sedikit perhatian pada keindahan dan kekayaannya. Banyak warga merasa dicap oleh para pakar universitas sebagai populasi bermasalah, yang mengarah pada pencabutan hak lebih lanjut. Ketika kami dari universitas memasuki komunitas, kami memasuki memori masa lalu ini dan perasaan dendam terhadap orang-orang yang berafiliasi dengan institusi.

Meskipun hambatan historis semacam ini sangat sulit dihindari, namun ada beberapa langkah yang dapat dipersiapkan perencana sebelum memasuki masyarakat dengan identitas budaya yang kuat. Pertama, perencana perlu melakukan studi tentang sejarah komunitas dari sudut pandang mereka yang tinggal di sana serta dari sumber lain.

Hal ini membantu perencana mengidentifikasi masalah yang perlu diklarifikasi, seperti tujuan dan proses visi dan sifat kemitraan antara universitas dan masyarakat. Penting juga untuk meyakinkan warga bahwa proses perencanaan dipimpin oleh masyarakat dan kepemilikan proyek terletak pada asosiasi masyarakat.

2. Menghadapi perbedaan, artikulasi nilai-nilai budaya, dan identitas sosial

Perencanaan bisa menjadi proses yang intimidatif jika terkait dengan lembaga yang tidak bisa menampung partisipasi komunitas. Isu rasial dan marginalisasi juga telah membawa nama buruk perencana.

Misalnya saja, kelompok masyarakat yang pernah digusur, akan memandang bahwa perencanaan adalah alat orang kaya dan berkuasa. Di atas tantangan ini, perencanaan berbasis budaya, setidaknya mengundang individu untuk mengekspresikan sudut pandang, nilai, dan visi yang berbeda secara budaya. Perencana juga akan menemukan



Kota Honolulu dengan pantai Waikiki

Sumber: www.visittheusa.com

tantangan pada persepsi dan pendapat warga mengenai perencanaan, terutama warga anggap spesifik untuk kelompok budaya mereka. Mengungkap nilai pribadi, termasuk yang spesifik secara budaya, dapat menjadi proses yang peka secara sosial untuk setiap peserta. Semua orang juga tidak mau mengungkapkannya secara terbuka.

Informasi yang dibagikan seseorang tidak akan membuatnya diejek atau digunakan untuk melawan mereka di masa mendatang adalah hal yang penting untuk diterapkan. Membangun kepercayaan antara perencana dan konstituen bersama dengan kepercayaan di antara para peserta seringkali bukan langkah yang jelas dalam proses perencanaan. Namun, kepercayaan yang baik dan lingkungan yang aman dapat mendukung proses perencanaan berbasis budaya.

Proses dan teknik perencanaan yang sesuai dengan budaya juga dapat memfasilitasi ekspresi identitas dan nilai-nilai budaya. Misalnya, perencana

bisa saja bertemu budaya di mana mendongeng adalah metode yang biasa digunakan untuk menyampaikan pengetahuan atau berbagi pemahaman tentang diri atau tempat dan waktu. Ini khususnya berlaku bagi mereka yang memiliki tradisi lisan yang kuat. Maka dalam hal ini, audiensi resmi dengan cara memberi kesempatan lima menit di mikrofon untuk memberi masukan adalah hal yang sangat tidak efektif. Alih-alih, sebuah tradisi di Hawaii, yang disebut "kisah bincang-bincang" (berbagi cerita dalam tradisi lisan) mungkin merupakan cara ekspresi yang lebih alami dan nyaman.

3. Memahami berbagai makna Bahasa

Bahasa bisa menjadi kekuatan untuk mencegah atau mendorong, menekan atau melepaskan, melegitimasi atau menurunkan. Bagaimana perencana mengutarakan apa yang mereka katakan, bagaimana mereka memilih kata-kata mereka, dan bagaimana mereka menyampaikan pesan mereka dapat mempengaruhi sejauh mana konstituen

berpartisipasi atau menarik diri dari proses perencanaan. Epistemologi, sebagai lensa untuk interpretasi, memediasi bagaimana pesan disampaikan dan diterima.

Penulis menemukan tantangan saat melakukan proses *visioning* di Papakolea. Di kalangan orang tua, istilah "*visioning*" memiliki makna yang suci. Penulis belajar setelah mengetahui bahwa "*visi*" adalah istilah yang digunakan oleh banyak *kupuna* (generasi tua) untuk merujuk pada praktik yang sangat pribadi. Biasanya terjadi saat sedang bermimpi. "*Visioning*" juga merupakan bentuk komunikasi dengan leluhur yang didewakan atau *'aumakua*. Ketika diumumkan bahwa mahasiswa akan memfasilitasi proyek "*Visioning*" di Papakolea, sejumlah *kupuna* memanggil presiden Asosiasi Masyarakat Papakolea untuk menyuarakan keberatan mereka. Setelah makna "*Visioning*" diklarifikasi dan diperjelas, maka *kupuna* memberikan persetujuan mereka. Pihak universitas pun dididik tentang penggunaan istilah ini.

4. Menghormati protokol budaya dan hubungan sosial

Protokol adalah kode etik yang ditentukan dalam pertemuan formal. Secara umum, protokol mencakup berbagai perilaku, seperti cara satu orang mengatasi yang lain, menghormati hirarki sosial, persembahan simbolis, norma pertukaran dan timbal balik, dan bahkan cara memfasilitasi diskusi.

Perencana yang memasuki komunitas tanpa pengetahuan tentang protokol setempat, dapat melakukan atau mengatakan hal-hal (sengaja atau tidak) yang justru membungkam partisipasi masyarakat setempat. Sebaliknya, demonstrasi protokol yang tepat dapat sangat meningkatkan partisipasi.

Contoh paling jelas dari pentingnya protokol di kalangan masyarakat Papakolea, adalah kebutuhan untuk mendapatkan berkah para generasi tua (*Kupuna*), terutama mereka yang telah memainkan peran kepemimpinan di

masa lalu masyarakat. Izin dari mereka sangat penting untuk meluncurkan proses perencanaan. Proses perencanaan untuk memetakan jalan ke depan, harus mencari kebijaksanaan *kupuna* tentang masa lalu dan impian serta keinginan para pemuda yang akan menjalani masa depan yang jauh.

Tetapi para perencana sering menemui komunitas yang terfragmentasi di mana protokol justru menghambat partisipasi massa. Ada beberapa komunitas yang melihat secara positif terhadap partisipasi yang demokratis dan mereka cenderung mendukung proses inklusif. Namun ada juga komunitas yang masih kuat secara ideologi dan menentang partisipasi. Di sini perencana harus bijak memutuskan untuk mengikuti protokol atau menentangnya. Keduanya dapat dilakukan namun harus dengan pertimbangan yang matang, setelah mengenali struktur sosial dan norma-norma budaya dalam suatu komunitas.

5. Memahami Peran Kekuasaan para Penerjemah Budaya

Para perencana sering mencari bantuan dari penafsir budaya. Mereka adalah orang-orang yang secara budaya berakar dalam komunitas tradisional dan yang sama-sama fasih dalam bahasa modern. Mereka sering berfungsi sebagai jembatan dan membantu mengidentifikasi perbedaan dalam interpretasi dan memfasilitasi komunikasi lintas budaya.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menggunakan kekuasaan dalam proses perencanaan berbasis budaya. Pertama, dengan meninggikan pengaruh atau kedudukan penerjemah budaya. Kedua, dengan melegitimasi beberapa epistemologi dan mengakui klaim budaya. Meskipun kedua opsi ini masih memunculkan beberapa pertanyaan terkait moral dan etika.

Penerjemah budaya juga dapat memainkan peran kunci dalam memfasilitasi suatu wacana. Dalam hal komunitas imigran misalnya, penerjemah



"Kupuna" Komunitas Sesepeuh Masyarakat Papakolea Hawaii

Sumber: www.kula-papakolea.com

dapat menyediakan terjemahan bahasa. Selain itu, mereka dapat mengidentifikasi episode sejarah yang harus dipahami oleh perencana, mengingat sifat dari proyek perencanaan tertentu.

Mereka dapat memberikan peta jejaring sosial dalam suatu komunitas dan hubungan historis dan terkini antara jejaring dan organisasi tersebut. Mereka dapat memberi saran kepada perencana tentang protokol budaya, gaya komunikasi, dan simbol budaya sehingga perencana dapat secara efektif mendekati komunitas dan merancang proses partisipatif yang tepat.

Alih kode dan perencanaan yang dipimpin masyarakat

Tantangan epistemologi perencanaan di kota-kota yang beragam secara budaya sangat banyak. Termasuk bagaimana merancang metode dan mengembangkan kepekaan untuk mengidentifikasi berbagai epistemologi

dan memfasilitasi keinginan dari beragam pandangan. Salah satu opsi adalah menemukan perencana yang dapat beralih kode (*codeswitching*) ketika bertemu dua budaya yang berbeda. Alternatif lainnya adalah praktik perencanaan yang dipimpin masyarakat (*community-led planning*) dimana perencana aktif terlibat dalam perencanaan berbasis masyarakat.

Dirangkum dan diterjemahkan oleh: Mutri Batul Aini

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari empat media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini potongan pemberitaan terpilih pada bulan April-Mei.

Kliping berita BPIW dapat di download di: bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook

► PENGEMBANGAN KOTA BARU

Tanjung Selor Terus Bersolek

Bisnis, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang mengembangkan infrastruktur di kota baru Tanjung Selor, Kalimantan Utara sehingga mampu menarik minat investor ke kawasan itu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sudah membuat rencana induk untuk pengembangan Tanjung Selor.

Setelah rencana induk dibuat oleh BPIW, kini tugas beralih kepada Kementerian PUPR untuk pengimplementasiannya.

"Kalau bidang kami (membangun) di jalan, di air minum, di embung-embung, di sana kan pulau-pulau kecil. Jadi, kami sudah bangun beberapa sumber air minum, kami akan bangun lagi. Selain itu, kami akan bangun jembatan," ujarnya, Jumat (29/3).

Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk melakukan pengembangan di Tanjung Selor. "Ada pihak swasta yang sudah tertarik di sana, sudah ada."

Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengungkapkan bahwa badan itu membutuhkan anggaran Rp82,40 miliar untuk beberapa program yang disepakati.

Apabila diperinci, beberapa program yang disepakati a.l. pembangunan

rumah susun bagi aparat sipil negara tipe 36 setinggi 4 lantai di Kabupaten Bulungan sebanyak 58 unit dan pelebaran jalan batas Bulungan-Tanjung Selor sepanjang 4,29 kilometer. Selain itu, kata Hadi, investor swasta masih menunggu pengembangan kawasan karena potensi masyarakat yang masih sedikit yakni 35.000 orang.

Meskipun begitu, terdapat pendapat potensi ekonomi yang ditawarkan yakni kawasan industri Tanah Kuning yang diharapkan dapat menjadi pemicu untuk investor masuk.

"Kayaknya di sana basisnya pertanian dan perkebunan. Yang jelas kalau investor sudah bangun yang pasti dibutuhkan tenaga kerja," ujarnya.

Kawasan industri Tanah Kuning merupakan salah satu kawasan industri prioritas yang termasuk dalam Perpres No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sehingga perlu didukung konektivitas Tanjung Selor-KI Tanah Kuning.

Tahun ini, BPIW juga melakukan kajian ulang desain kawasan pemerintahan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor seluas 800 hektare serta menyusun rencana pengembangan tahap pertama yang mencapai 200 hektare.

Adapun, ungkap Hadi, untuk 2020 telah direncanakan beberapa program infrastruktur PUPR di Provinsi Kaltara,

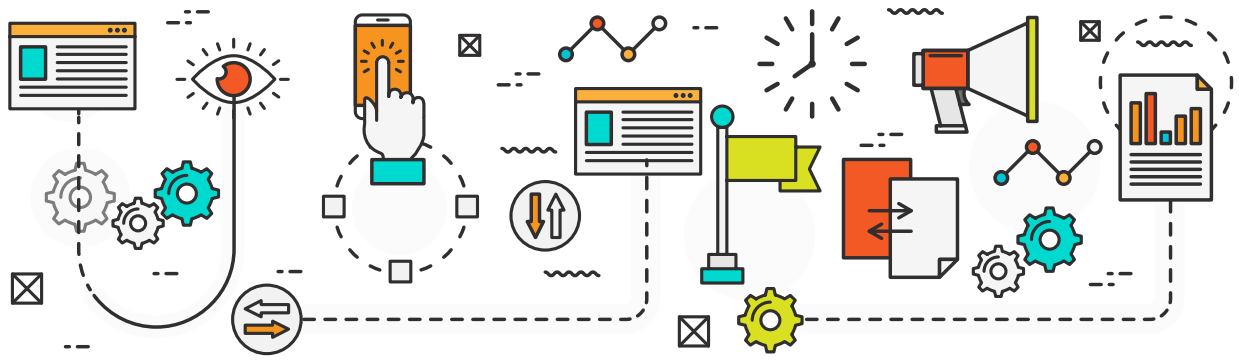
antara lain pembangunan Jalan Malinau-Long Semamu 1 dan 2, pembangunan embung Sei Limau di Pulau Sebatik, pembangunan tempat pembuangan sampah di Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, dan Kota Tarakan, serta pembangunan rumah khusus.

Tanjung Selor diharapkan menjadi pendorong perekonomian di kawasan perbatasan.

Untuk itu, Tanjung Selor diarahkan sebagai pusat pemerintahan dan pendukung kawasan ketahanan pangan serta kawasan agroindustri yang produktif, berjatidiri dan lestari.

Jika merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, ada 10 kota yang akan dikembangkan pemerintah menjadi kota baru atau kota mandiri. Namun, hingga memasuki 2019, belum ada perkembangan yang cukup nyata dari rencana tersebut. Hingga kini baru Kota Maja di Banten yang terus membangun.

Jika merujuk laman <http://sim.cipta-karya.pu.go.id/kotabaru/>, di situ dicantumkan ada 11 perencanaan kota baru, yakni Kota Baru Pontianak, Tanjung Selor, Padang, Palembang, Maja, Banjar Baru, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Morotai. (Krizia P. Kinanti)



Teropong Media edisi 39 ini, mengulas dua tulisan. Ulasan pertama ini terkait berita yang berjudul “Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor Terus Bersolek” di *Harian Bisnis Indonesia* pada Senin, 1 April 2019. Berikut ulasannya :

Pengembangan Kota Baru Untuk Mengantisipasi Urban *Sprawl*

Dalam berita tersebut disampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang mengembangkan infrastruktur di kota baru Tanjung Selor, Kalimantan Utara sehingga mampu menarik minat investor ke kawasan itu. Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Suahyono mengungkapkan dibutuhkan anggaran Rp 82,40 miliar untuk beberapa program yang disepakati di kota tersebut.

Pengembangan kota baru bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya urban *sprawl* atau penyebaran penduduk yang tidak terkendali. Oleh karenanya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan untuk dibangun 10 kota baru yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali. Pembangunan kota baru tersebut diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Ke-10 kota baru tersebut adalah Sei Mangkei di Provinsi Sumatera Utara, Maja di Banten, Bandar Kayangan di Lombok, Pontianak di

Kalimantan Barat, Sofifi di Maluku Utara, Tanjung Selor di Kalimantan Utara, Sorong di Papua Barat, Manado di Sulawesi Utara, Banjarbaru di Kalimantan Selatan, dan Palembang di Sumatera Selatan. Dari 10 kota baru tersebut, pemerintah memprioritaskan Tanjung Selor, Maja, dan Sofifi.

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki konsep pengembangan kota baru yang bersifat tematik. Dalam konsep tersebut, kota baru juga memiliki fungsi tertentu yang menjadi basis ekonomi.

Basis ekonomi ini harus dilihat dari potensi yang ada di daerah itu. Potensi yang dimaksud seperti potensi industri, pariwisata, pusat pemerintahan, maupun pendidikan. Basis ekonomi ini sangat penting, agar kota baru tersebut dapat terus hidup dan berkembang.

Perencanaan kota baru juga mengusung keseimbangan populasi dalam suatu kota, antara kalangan kelas atas, menengah, dan bawah. Caranya dengan mengendalikan harga tanah agar tidak terlalu mahal, dan menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Membangun kota baru bukan hal yang mudah, karena membutuhkan konsistensi dan keterlibatan semua pihak. **(Hendra)**

Pemindahan Ibu Kota akan Masuk RPJMN

■ SAPTO ANDINA CAMORA
RETNO WULANDARI

Pemerintah memiliki dua skema pemindahan ibu kota.

JAKARTA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terus mematangkan pemindahan ibu kota. Sesuai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir April, ibu kota bakal dipindahkan ke luar Pulau Jawa.

Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin mengatakan, pemindahan ibu kota bakal dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Akan kita cantumkan di RPJMN 2020-2024," kata Imron melalui pesan singkat kepada Republika, Jumat (3/5).

Sayangnya, Imron menolak berkomentar lebih jauh ketika ditanyakan hal lain seputar pemindahan ibukota. Pejabat lain di Bappenas jugabersikap serupa.

Jika memilih rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 yang disampaikan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menghadirimusyawarah perencanaan pembangunan di Surabaya, awal April ada lima tema yang menjadi fokus pembangunan pemerintah selamaperiode RPJMN tersebut.

Kelima tema itu adalah pembangunan manusia pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan pembangunan infrastruktur, dan pembangunan politik, hukum, pertahanan, serta keamanan. Dalam hal fokus pembangunan kewilayahan, Bappenas mencantumkan tiga poin, yaitu sentra-sentra pertumbuhan, komunitas unggulan daerah, dan pertumbuhan perkotaan.

Sementara itu, terkait isu strategis kewilayahan, Bappenas menyorotisoal pengelolaan urbanisasi. Penduduk perkotaan diperkirakan bakal mencapai 60 persen. Namun, kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional rendah. Setiapsatu persen urbanisasi hanya menghasilkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar empat persen. Padahal, dinegara lainnya, seperti di India, bisa mencapai 13 persen. Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan, pemindahan ibu kota membutuhkan waktu hingga 10 tahun dan dimulai paling cepat pada 2020.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djallil mengatakan, pemerintah pusat telah menyiapkan 300 hektare lahan di luar Pulau Jawa untuk membangun ibu kota baru. Kendati demikian, Sofyan menutup rapat-rapat letak lahan tersebut.

Sofyan menjelaskan, pemerintah sengaja tidak membocorkan lokasi

”**Sudah ada lahannya, sudah disiapkan**

Sofyan Djallil
Menteri Agraria dan
Tata Ruang

pasti ibu kota pemerintahan agar tidak terjadi lonjakan harga tanah oleh spekulasi. Yang jelas Pak Presiden mengatakan di luar Jawa. Kita sudah ada lahannya, sudah disiapkan, ujar Sofyan di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Sofyan menambahkan, lahan seluas 300 hektare di luar Pulau Jawa disiapkan tanpa mengesampingkan pembangunan taman-taman kota. Menurut dia, ibu kota pemerintahan yang haru akan dilengkapi taman kota yang luas.

Pemerintah memiliki dua skema pemindahan ibu kota. Skema pertama, ibu kota baru akan dibangun di atas lahan seluas 40 ribu hektare dengan total jumlah penduduk 1,5 juta orang dengan kebutuhan biaya berkisar Rp466 triliun. Skema kedua, ibu kota dibangun di atas lahan 30 ribu hektare dengan total penduduk sebesar 870 ribu orang dengan asumsi biaya yang dibutuhkan berkisar Rp 323 triliun.

Berkelanjutan

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pemerintah perlu memastikan kajian pemindahan ibu kota secara detail yang meliputi kepastian pengembangan ekonomi ibu kota baru, struktur anggaran, pembangunan infrastruktur, kepastian politik, hingga harmonisasi regulasi terkait daerah dan pusat. "RPJMN sifatnya, statusnya belum bisa tetap," kata Adi.

Menurut dia, wacana pemindahan ibu

kota oleh pemerintah belum masuk dalam tahapan pembahasan detail. Padahal, ia menambahkan, pemindahan ibu kota bukan hal mudah dan harus dipastikan dapat berkelanjutan meski pemerintahan dan iklim politik berganti.

Lawan politik pemerintah dianggap perlu memiliki komitmen serupa. Artinya, kata dia, pemerintah perlu merangkul seluruh elemen, baik dari lingkup legislatif, daerah, hingga eksekutif untuk mengkaji secara detail skema perpindahan yang akan dilakukan.

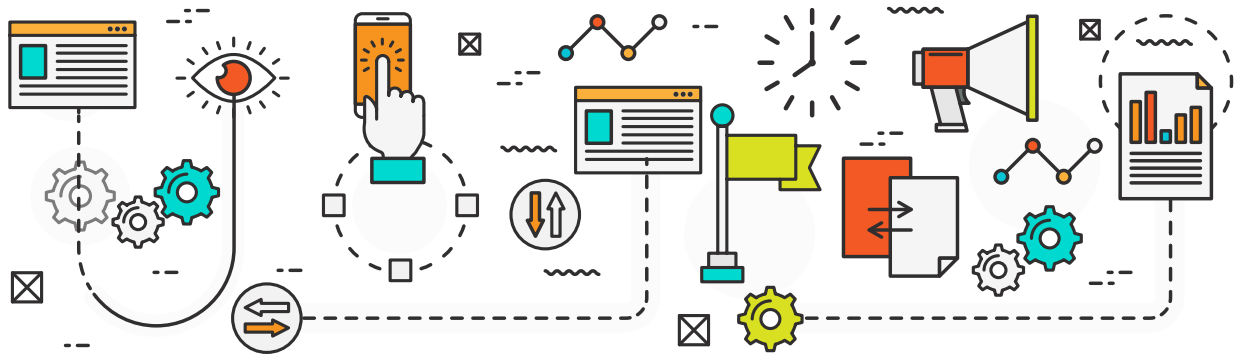
Terjaminnya payung hukum bagi para pelaku usaha juga harus menjadi pertimbangan penting. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengingatkan pemindahan ibu kota jangan sampai merugikan banyak pihak.

Hariyadi mengatakan, pemindahan ibu kota akan berlangsung dalam jangka panjang dan tak bisa diselesaikan dalam satu periode pemerintahan. "Jangan sampai tidak ada payung hukum kuat dan apabila ada pergantian presiden lima tahun lagi enggak jalan. Akibatnya, merugikan kita semua," ujar Hariyadi.

Ia mengakui wacana pemindahan ibu kota ke luar Jawa akan mendatangkan banyak manfaat, salah satunya pemerataan kue ekonomi. "Pertumbuhan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

■ Ines Damayanti ed-Satria Kartika Yudha





Ulasan kedua ini terkait berita di Republika, pada Sabtu 4 Mei lalu.

Berikut ulasannya :

BPIW Akan Lakukan Kajian Ibu Kota Negara yang Baru

Pada berita yang diberi judul “Pemindahan Ibu Kota akan Masuk RPJMN” ini disebutkan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota. Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin mengatakan, pemindahan ibu kota bakal dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dimasukkannya pemindahan ibu kota ini ke dalam RPJMN merupakan langkah yang tepat, mengingat proses pemindahan ini membutuhkan waktu yang lama. Banyak hal yang harus disiapkan seperti lahannya, infrastruktur yang akan dibangun, penataan ruang, dan termasuk juga masalah payung hukumnya.

Sampai saat ini Bappenas masih mengkaji beberapa kota di Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota negara menggantikan Jakarta. Setelah ditentukan kotanya, maka nantinya Kementerian PUPR melalui BPIW akan mengkaji atau menganalisis lebih dalam pengembangan kota tersebut dan nantinya akan dibuatkan *side plan*.

Secara umum, ada tujuh arah kebijakan jangka menengah Pulau Kalimantan Tahun 2020-2024, pertama, peningkatan konektivitas, mobilitas, waktu tempuh serta integrasi antarmoda baik antarpusat kegiatan, antarpulau, antarsarana perhubungan, dan antarpusat pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperkuat keterkaitan pengembangan wilayah

pinggiran dengan pusat kegiatan serta pengoptimalan upaya menuju jalan sesuai standar nasional dan standar keselamatan.

Arah kebijakan jangka menengah yang kedua adalah peningkatan ketersediaan air sepanjang waktu untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan di perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia.

Poin keempat adalah pengembangan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah, khususnya untuk peningkatan ketahanan dan kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

Arah kebijakan yang kelima adalah peningkatan fungsi kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional serta pertahanan keamanan negara.

Selanjutnya yang keenam adalah pengembangan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah, khususnya untuk pengembangan kawasan strategis, termasuk di dalamnya situs warisan Indonesia, situs warisan dunia, kawasan pusaka, kawasan pariwisata, serta kawasan strategis ekonomi.

Pengembangan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah, khususnya pembangunan infrastruktur dalam rangka mempertahankan fungsi lindung kawasan konservasi menjadi poin yang ketujuh dari arah kebijakan jangka menengah pulau tersebut. Dengan adanya arah kebijakan jangka menengah itu, diharapkan dapat memperjelas penataan kawasan tersebut menjelang perpindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. **(Hendra)**

Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Ditetapkan 2020, Proses Penyusunan Terus Ditajamkan dan Dimatangkan

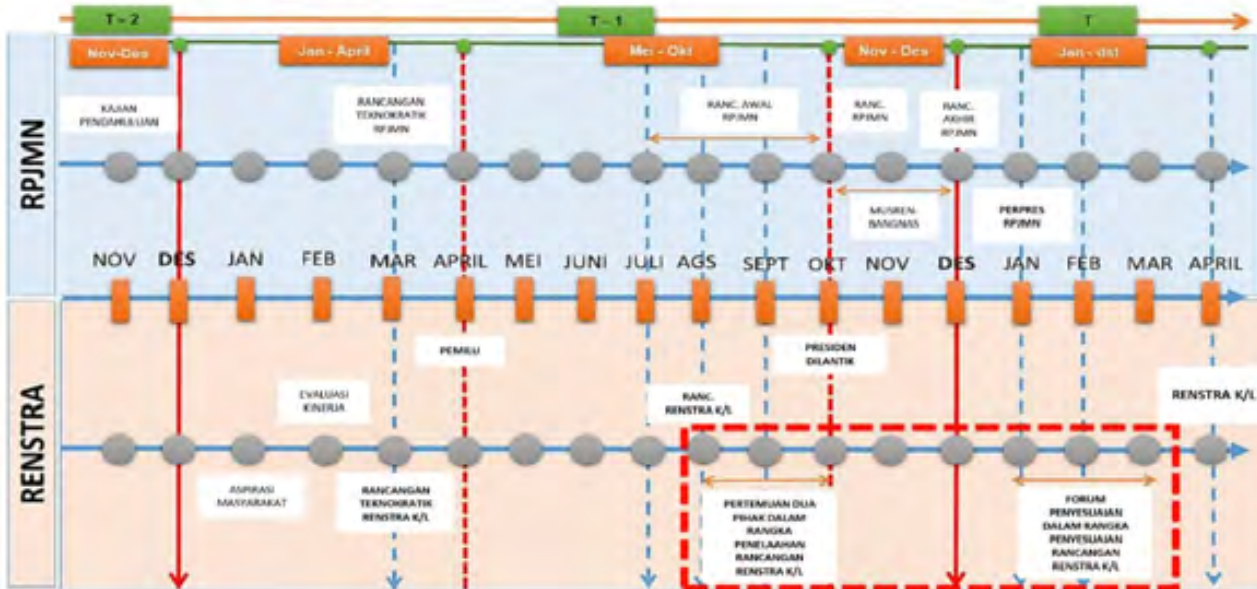


Pada tahun 2024 untuk sektor Penyediaan Perumahan ditargetkan dapat memenuhi lima juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sumber: Dok. BPIW

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan dengan periode lima tahunan yang disusun kementerian/lembaga (KL). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) salah satu kementerian yang berkewajiban menyusun Renstra sebagai pedoman kerja lima tahun ke depan. Tepatnya, Renstra 2020-2024. Penyusunan Renstra ini tentu tidak sembarangan, namun harus sesuai aturan yang berlaku. Seperti mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam prosesnya, saat ini Renstra yang disusun Kementerian PUPR masih kriteria Renstra Teknokratik sebelum ditetapkan sebagai Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 pada tahun 2020 nanti.

TIMELINE RPJMN DAN RENSTRA 2020 - 2024



Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) saat ini masih terus menajamkan dan mematangkan penyusunan Renstra Teknokratik Kementerian PUPR 2020-2024. Renstra tersebut akan memuat dokumen arahan mengenai tujuan, visi, misi, target dari program yang direncanakan dan target output dari program untuk dilaksanakan seluruh unsur organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR sampai 2024 mendatang.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menerangkan, Renstra Kementerian PUPR sedikitnya akan mencakup antara lain, Visi Misi Presiden terpilih tanggal 14 Juli 2019. Kemudian, Visi Indonesia 2045 yang disusun Bappenas.

Selanjutnya, isu strategis yang dapat dibagi menjadi *cross cutting issues* (gender, MAPI dan bencana, investasi, COP21 Paris Agreement, NUA) dan isu sektoral (kewilayahan, SDM, Reformasi Birokrasi, SDGs).

Selain itu, Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional seperti

Kawasan Perbatasan, Lumbung Pangan, Metropolitan, Kota Baru dan lainnya.

“Termasuk keterkaitan infrastruktur dengan Kawasan pertanian, kebun rakyat, industri dan kawasan-kawasan lainnya serta pembahasan terkait dengan evaluasi dan penyesuaian WPS (Wilayah Pengembangan Strategis, - red)”, jelas Hadi.

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo menjelaskan, dalam penyusunan Renstra saat ini masih dilakukan penajaman dan pematangan. “Adapun untuk waktu penetapan Renstra Kementerian PUPR sendiri adalah tiga bulan setelah penetapan RPJMN 2020-2024 yang jadwal penetapannya pada Januari 2020,” terang Bobby, beberapa waktu lalu.

la memaparkan landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR mengacu terhadap beberapa aturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Untuk waktu penetapan Renstra Kementerian PUPR sendiri adalah tiga bulan setelah penetapan RPJMN 2020-2024 yang jadwal penetapannya pada Januari 2020,”

Sistematika dalam Renstra 2020-2024 ini meliputi, pendahuluan yang menggambarkan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau

Sumber: Dok. BPIW

“Peraturan Pemerintah (PP,-red) No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,” jelas Bobby.

Ada juga PP No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Kemudian, Peraturan Presiden (Perpres,-red) No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, j.o. Perpres No. 13 tahun 2014.

“Selain itu, ada juga Permen PUPR No. 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, j.o. Permen PUPR No. 05 tahun 2017, j.o. Permen PUPR No. 3 tahun 2019,” jelas Bobby.

Ada juga Permen PPN No. 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020 – 2024 serta Permen PUPR No. 13.1 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2015 – 2019, j.o. Permen PUPR No. 8 tahun 2018.

Bobby juga menerangkan, sistematika dalam Renstra 2020-2024 ini meliputi, pendahuluan yang menggambarkan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. “Selanjutnya visi, misi dan tujuan yang menggambarkan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,” terangnya.

Visi Kementerian PUPR dalam Renstra 2020 – 2024 yang diangkat adalah terwujudnya infrastruktur dan SDM pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk Indonesia yang maju, adil dan makmur.

Ia menerangkan, adapun misi Kementerian PUPR pada Renstra 2020 – 2024 ada beberapa, antara lain, pertama, meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dengan pengembangan wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan investasi dan daya saing global.



Untuk jalan baru pada tahun 2024 ditargetkan terbangun sepanjang 2.500 Km.

Sumber: Dok. BPIW

Kedua, ujarnya, mengembangkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang keberlanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pada mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim.

“Ketiga adalah meningkatkan kualitas SDM PUPR untuk peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia menuju terwujudnya kesejahteraan, serta keempat adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pendanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan inovasi teknologi dalam kerangka reformasi birokrasi”, paparnya

Setelah itu, lanjutnya, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kelembagaan untuk menggambarkan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan strategi, langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

“Selanjutnya ada target kinerja kerangka pendanaan, dalam hal ini target kinerja adalah keluaran/hasil

dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dan terakhir dalam dokumen Renstra itu penutup. Diawali pendahuluan sampai penutup,” jelasnya.

Selain itu, Bobby menerangkan, kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan Renstra ini sesuai dengan Permen Bappenas No. 5/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga tahun 2020 – 2024 tersebut memuat amanah satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk kerangka regulasi serta kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah. Adapun arah dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat adalah upaya untuk mencapai tujuan.

Untuk strateginya, lanjut Bobby, strategi harus menggambarkan langkah-langkah dalam bentuk tindakan konkret untuk mewujudkan visi dan misi. Langkah-langkah tersebut berisikan program-program

Strategi harus menggambarkan langkah-langkah dalam bentuk tindakan konkret untuk mewujudkan visi dan misi.

Pengembangan investasi yang produktif dan bernilai tambah tinggi dengan fokus wilayah, sektor dan komoditas unggulan yang jelas.

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kemudian, hasil peninjauan yang selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada K/L yang bersangkutan apakah rumusan Strategi K/L sudah sesuai atau belum sesuai.

Dalam renstra itu ada juga kebijakan kewilayahan, lanjutnya, yang memuat beberapa unsur, pertama pengembangan investasi yang produktif dan bernilai tambah tinggi dengan fokus wilayah, sektor dan komoditas unggulan yang jelas.

“Kedua, pengembangan tenaga kerja, petani dan nelayan yang terdidik dan terampil,” ujarnya. Bobby menambahkan, untuk ketiga adalah pengembangan teknologi dan inovasi yang produktif untuk mendukung hilirisasi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pertambangan. Keempat adalah pembangunan infrastruktur strategis: jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, pasar, tempat pelelangan ikan dan lainnya .

Kelima optimalisasi pariwisata daerah, Kemudian, keenam adalah percepatan pembangunan wilayah

melalui, peningkatan kualitas jaringan infrastruktur wilayah, percepatan peningkatan kualitas SDM/ tenaga daerah, perbaikan kualitas kelembagaan , peningkatan kapasitas dalam penataan ruang wilayah, pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat serta Penguatan promosi daerah .

“Ketujuh adalah peningkatan kualitas jaringan infrastruktur wilayah melalui memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan, pemfasilitasi percepatan pembebasan lahan dan kemudahan investasi,” teranya.

Adapun kedelapan prioritas kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dalam perekonomian seperti KI, KEK, Kawasan Metropolitan. Dan terakhir kesembilan adalah kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dalam pertahanan dan keamanan seperti pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan.

Bobby juga mengatakan, target 2024 pada sektor Sumber Daya Air (SDA) ada tambahan 36 bendungan selesai yang merupakan dari periode sebelumnya, tambahan 500 embung dengan asumsi penduduk mencapai





Target 2024 pada sektor Sumber Daya Air (SDA) ada tambahan 36 bendungan selesai yang merupakan dari periode sebelumnya

Sumber: Dok. BPIW

282.246.600 jiwa. "Target 2024 untuk sektor Bina Marga (BM,-red) ada jalan mantap 97 persen, terbangun jalan tol 1.500 Km, jalan baru 2.500 Km serta jembatan baru 60.000 M. Sedangkan, target sektor Cipta Karya adalah penyediaan 88 persen air minum, penyelesaian 17.000 ha kumuh, penyediaan 85 persen Sanitasi," terangnya sambil menambahkan, target 2024 sektor Penyediaan Perumahan adalah pemenuhan 5 juta *Backlog* MBR, Pembangunan 3,9 juta unit rumah dengan komposisi 20 persen -30 persen APBN/APBD dan 70 persen-80 persen Swasta/ Masyarakat.

Ia mengatakan, untuk roadmap skema pembiayaan infrastuktur 2020-2024 sendiri, ada beberapa tahap, yakni tahap I adalah *Starting Point* 2019 – 2020, meliputi identifikasi proyek, pipeline infrastruktur PUPR & studi kelayakan proyek Non APBN.

"Tahap II untuk tahun 2020 - 2021 adalah proses konstruksi dan peningkatan partisipasi swasta dalam pembiayaan infrastruktur PUPR," terangnya.

Tahap III, lanjutnya, tahun 2021 - 2023 merupakan peningkatan kualitas dan kuantitas pembiayaan Non APBN. "Adapun Tahap IV, tahun 2023 - 2024 untuk peningkatan penggunaan instrumen pembiayaan & evaluasi pembiayaan infrastruktur PUPR Non-APBN. Dimana *outputnya* terpenuhinya anggaran infrastruktur PUPR," jelas Bobby.

Sementara itu, Sekretaris BPIW, Firman H. Napitupulu memaparkan tujuan dari Renstra untuk memberikan pedoman dan kebijakan Kementerian PUPR dalam menentukan prioritas di bidang pengembangan infrastruktur PUPR. Kemudian, Renstra menjadi pedoman arah kebijakan dalam penetapan kebutuhan alokasi anggaran.

Menurutnya, keberadaan Renstra untuk mempermudah pengendalian kegiatan serta melaksanakan koordinasi antar instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi dan monitoring kegiatan secara internal maupun eksternal. **(ris/BPIW)**

Keberadaan Renstra untuk mempermudah pengendalian kegiatan serta melaksanakan koordinasi antar instansi terkait

Orange Smart City 4.0

Disampaikan oleh

Ir. Firman H. Napitupulu, MURP (Sekretaris BPIW)

dalam Keynote Remarks Seminar Nasional Kota Denpasar Menuju Kota Budaya 2020

Indonesia, dengan luas daratan 1,3 persen dari muka bumi, merupakan salah satu negara yang mempunyai *biodiversity* paling kaya di dunia. Jajaran archipelago yang membentang di khatulistiwa membentuk ekosistem pada setiap pulau yang unik. Selain itu, bentang alam, ragam etnis dan situs arkeologi yang terdapat di seluruh nusantara membentuk sebuah kebudayaan yang maha kaya. Keanekaragaman suku di Indonesia yang berjumlah 1.340 (sumber : BPS) dilengkapi dengan berbagai macam variasi bahasa, pakaian, arsitektur bangunan, lukisan, pahatan, manuskrip, adat istiadat, masakan, tarian, ritual dan sebagainya, sering diasosiasikan dengan konsep budaya suatu daerah.

Kebudayaan dan teknologi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Kebudayaan akan menciptakan teknologi berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan ide-ide kreatif, dan ketika teknologi berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan, teknologi merubah kultur dan cara hidup masyarakat. Kebudayaan yang tumbuh secara tradisional sejalan dengan waktu dapat berkembang menjadi sebuah industri, tentunya jika didukung dengan sumber daya yang mumpuni. Kerap kita dengar industri batik atau industri jamu yang berasal dari proses atau racikan tradisional kemudian dibakukan sehingga dapat bersaing secara global.

Budaya

Menurut *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO), industri berbasis budaya lahir dari sebuah transformasi, dimana sebuah kebudayaan dipikirkan, dipahami

dandidiseminasikan oleh masyarakat pada wilayah tertentu. Transformasi ini terjadi karena adanya dorongan teknologi yang mampu menggeser sudut pandang ke arah media digital, terutama dalam bidang informasi dan telekomunikasi yang mampu merubah "bungkus" obyek-obyek budaya pada tahapan produksi dan sirkulasinya.

Budaya erat kaitannya dengan sebuah wilayah, hingga dapat dikatakan bagai ayam dan telur, sulit menentukan yang mana lahir terlebih dahulu. Tetapi satu hal yang pasti, berkembangnya sebuah wilayah berjalan seiring dengan perkembangan budayanya. Selain faktor manusia sebagai agen penentu, pengembangan sebuah wilayah tidak terlepas dari berbagai macam entitas pendukung yang berada di dalamnya, salah satunya adalah dukungan infrastruktur. Keberadaan infrastruktur terbangun ini menentukan pola, pertumbuhan dan sebaran aktivitas sosial ekonomi budaya masyarakat.

Kota Budaya

Aktivitas sosial ekonomi dominan terjadi di tempat bermukimnya warga, tempat bekerja, tempat kegiatan perekonomian, pemerintahan dan lain lain yang biasa kita sebut kota, dimana kota ini seyogyanya memenuhi kriteria dan kondisi tertentu untuk dapat dikatakan layak huni. Banyak kota mempunyai sebutan unik sesuai dengan karakteristik kota tersebut seperti kota pendidikan, metropolitan, wisata, minapolitan dan kota budaya.

Ciri suatu kota dapat dijadikan sebutan bagi kota tersebut, yang akhirnya dapat menjadi suatu ciri khas negaranya, contoh kota London di Inggris

*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi

yang memiliki sekitar 40 institusi akademis dan lekat dengan atmosfer pendidikan, pada akhirnya mempengaruhi negara Inggris menjadi negara yang maju dalam bidang akademis. Begitu juga kota budaya, diantara 39 kota budaya di dunia seperti Amsterdam, Buenos Aires, Montreal telah menjadikan negaranya lekat dengan negara yang mempunyai kebudayaan tinggi.

Bagaimana dengan Indonesia?. Terlepas dari Kota Aceh, Denpasar, Yogyakarta, Ambon yang merupakan kota-kota yang mempunyai unsur kebudayaan yang kental, ternyata tidak menjadikan kota tersebut diakui sebagai kota budaya. Sejatinya, sebutan kota budaya untuk sebuah kota, perlu ada pengakuan dari lembaga yang kredibel di dunia. Seperti halnya kemerdekaan sebuah negara, kepemilikan wilayah, rakyat dan pemerintahan tidak secara langsung melegalkan kedaulatan negara, dimana untuk diakui sebagai negara merdeka, tetap membutuhkan pengakuan negara lain. Dalam hal kota budaya, *World Cities Culture Forum* (WCCF) merupakan lembaga yang berhak menetapkan bahwa kota tersebut adalah kota budaya. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan budaya tidak mempunyai satupun kota budaya.

Dengan adanya fakta ini, kota Denpasar mulai berbenah diri dan mulai menginisiasi program menuju kota budaya dunia pada tahun 2020, dengan beberapa langkah strategis antara lain *pertama*, penetapan kebijakan berdasarkan UU 5/2007 dan UU 11/2010. *Kedua*, penetapan perencanaan dengan menjalankan PP 13/2017, Perpres 45/2011 dan Perda 12/2015. *Ketiga*, Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan. *Keempat*, Penetapan Skema Pembiayaan dan Pendanaan serta *terakhir* yakni Implementasi dan Provisi terkait Pengembangan/Pemanfaatan Ruang, Pengembangan Aset, Penggunaan Lahan, Pembangunan Hunian, Fasilitas Kerjasama Budaya, Fasilitas Pembangunan Budaya dan Proyek Revitalisasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang ditetapkan oleh WCCF.

Kenapa harus Kota Budaya?

Kebudayaan adalah sumber sekaligus tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kebahagiaan dan bukan pada pendapatan/pertumbuhan semata. Banyak negara di dunia tidak hanya berpatok terhadap Indeks Pembangunan

Manusia tetapi sudah menjadikan Indeks Kebahagiaan menjadi tolok ukur pembangunan suatu wilayah, seperti Finlandia dan Bhutan. UNDP dalam publikasinya menyatakan setidaknya 55 persen dari populasi dunia hidup di daerah perkotaan, dan diperkirakan hal ini akan terus meningkat menjadi 68 persen pada tahun 2050.

Dampak dari urbanisasi ini adalah terlampauinya ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan, hingga akhirnya menimbulkan pencemaran terhadap air, udara dan tanah. Selain itu, perkembangan industri ekstraktif pemanfaatan kekayaan alam, seperti industri pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan makin memperburuk dampak kerusakan lingkungan. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya penurunan standar kelayakan hidup, yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan pendapatan domestik bruto hingga berimplikasi terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi pada suatu kawasan bahkan pada sebuah negara.

Orange Economy

Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung mengarah ke eksploitasi sudah saatnya ditinggalkan. Paradigma pembangunan sektor ekonomi dengan adanya kemajuan teknologi sudah bergeser ke arah ekonomi kreatif. Istilah *Orange economy* yang populer untuk ekonomi kreatif, dipandang menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas ekonomi berbasis industri ekstraktif.

Orange Economy itu sendiri adalah pengembangan ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan intelektual manusia sebagai faktor produksi utama. *Orange economy* mengelaborasi antara ide atau gagasan seseorang dengan *cultural patrimony*, pengayaan konten yang berasal dari warisan budaya. Ide dan gagasan ini berpengaruh terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.1% diseluruh dunia, dengan catatan jika ide tersebut dapat diwujudkan secara nyata. Secara keseluruhan *orange economy* menduduki peringkat keempat di dunia dalam hal pendapatan secara global.

Teknologi dan Revolusi Industri 4.0

Pertumbuhan ekonomi kreatif tidak lepas dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan

komunikasi yang merambah dunia secara pesat. **Revolusi industri 4.0** yang sudah terjadi pada saat ini melibatkan pemikiran pembangunan berbasis sistem komunikasi dunia maya, seperti *Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Augmented Reality dan Machine Learning*. Hal ini membawa keuntungan dari segi ekonomi seperti peningkatan fasilitas produksi, peningkatan keamanan dan keselamatan pekerja di bidang yang berbahaya serta kontrol produksi yang terkomputerisasi lebih dapat dipercaya dan konsisten. Di lain sisi, Era 4.0 ini juga berimbas kepada hilangnya bidang pekerjaan yang sebelumnya menyerap banyak tenaga kerja, namun hal ini sepadan dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dengan mengedepankan potensi masing-masing wilayah sehingga wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Teknologi mengubah semua aspek dalam hidup kita, digitalisasi yang terjadi secara eksponensial memberikan dampak masif terhadap komunitas. Tantangan yang perlu diwaspadai bukan hanya terhadap kecanggihan peralatan, perangkat lunak maupun gawai yang digunakan tetapi bagaimana beradaptasi terhadap proses transformasi budaya yang perubahannya berjalan secara linier. Teknologi dan budaya adalah dua kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika sebuah

teknologi diperkenalkan ke masyarakat, budaya memberikan reaksi positif maupun negatif yang seiring waktu akan merubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perubahan masyarakat menciptakan kebutuhan dan ide-ide kreatif menuntut perubahan teknologi sehingga dapat dikatakan teknologi dan kebudayaan merupakan suatu siklus yang sangat erat kaitannya sehingga konsekuensinya ketika budaya berubah maka teknologi pun akan berkembang.

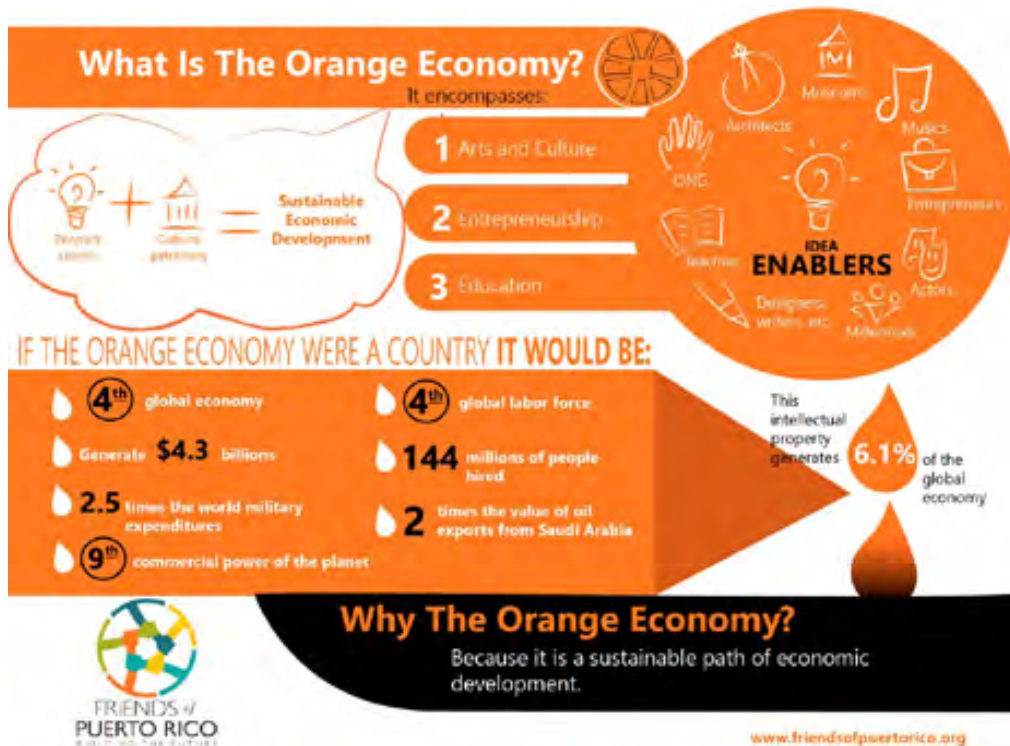
Kota budaya sebagai sebuah wadah perwujudan ekonomi kreatif harus dapat memastikan terjadinya *trickling effect*, yaitu turut berkembangnya sebuah industri karena adanya bisnis tertentu yang hadir disekitarnya, baru dapat dikatakan kota budaya menjadi sebuah *creative hub* yang berhasil. *Trickling effect* ini sangat dipengaruhi oleh arus teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menyebarkan informasi dalam waktu cepat, mudah diakses dan andal.

Infrastruktur Pendukung Ekonomi Kreatif

Jika budaya dapat kita analogikan sebagai konten, *orange economy* sebagai *delivery method*, teknologi informasi dan komunikasi sebagai *packaging* maka infrastruktur dapat kita analogikan sebagai *backbone* atau pilar pendukung. Peranan infrastruktur disini sangat penting terkait dengan seluruh aspek aktivitas sosial ekonomi.

Seperti yang sebelumnya disampaikan, *delivery* yang tepat, konten yang menarik tidak bisa tersampaikan tanpa adanya dukungan fasilitas. Kota budaya memerlukan infrastruktur yang tepat, ruang berekspresi, sarana pendidikan yang sesuai dan ruang produksi (*value-chain*). Selain itu juga dibutuhkan *soft infrastructure* yaitu mindset, tenaga kerja terampil, pemikir dinamis, pencipta dan pelaksana yang ujungnya adalah sumber daya manusia sebagai aktor ekonomi itu sendiri.

Pada pidatonya dalam *World Conference on Economy Forum* di Nusa Dua, Bali (8/11/2018), Menteri Keuangan Sri Mulyani



menyatakan bahwa infrastruktur merupakan pendukung berkembangnya industri kreatif di Indonesia, selain itu infrastruktur merupakan kebutuhan untuk mendesain kebijakan termasuk inklusivitas di teknologi ekonomi kreatif.

Selain itu beliau berkata, "Jika infrastruktur bagus maka pelaku kreatif dapat memiliki akses yang sama, mobilitas yang sama, dikenal oleh masyarakat luas secara sama. Memiliki kesempatan yang sama untuk semua insan yang memiliki ide kreatif". Selain itu, membangun sumber daya manusia yang mumpuni dalam mendukung terciptanya ekosistem industri kreatif yang baik juga sangat vital. Sri Mulyani berharap bila Indonesia terus konsisten dan mau terus memperbaiki *policy*, Indonesia bisa menjadi negara yang progresif dalam ekonomi kreatif dan mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju dalam ekonomi kreatif dapat terwujud. Tragisnya, sektor ekonomi kreatif kadang masih dipandang sebelah mata dibanding industri ekstraktif sehingga penyediaan infrastruktur yang menunjang kebudayaan sebagai modal ekonomi kreatif masih dirasa sangat tertinggal.

Jaringan jalan, jaringan energi, jaringan terlekomunikasi, infrastruktur pengairan dan perumahan merupakan infrastruktur dasar yang tidak terpisahkan dalam menunjang kehidupan. Banyak dari kita tidak berpikir bahwa jaringan jalan, jaringan pengairan, kelistrikan dan bangunan sebagai sebuah teknologi. Padahal menurut sosiolog Read Bain definisi teknologi meliputi peralatan, mesin, utensil, senjata, perumahan, pakaian, alat komunikasi dan transportasi serta infrastruktur. Menurut David Billington, Profesor di Universitas Princeton, menggolongkan teknologi menjadi dua kategori yaitu mesin dan struktur dan yang belakangan adalah pembentuk fondasi fisik dari sebuah komunitas.

Penting diingat teknologi digital yang membuat dunia kita semakin cerdas, proses digitalisasinya bergantung terhadap sistem yang dibangun secara fisik seperti jaringan serat optik dan satelit yang berfungsi mentransmisi data dan informasi yang diperlukan oleh setiap komunitas dan sektor industri.

Smart Cultural City

Smart Cultural City merupakan konsep kota pintar berbasis budaya merupakan wadah yang mendorong lahirnya ekonomi kreatif pada wilayah

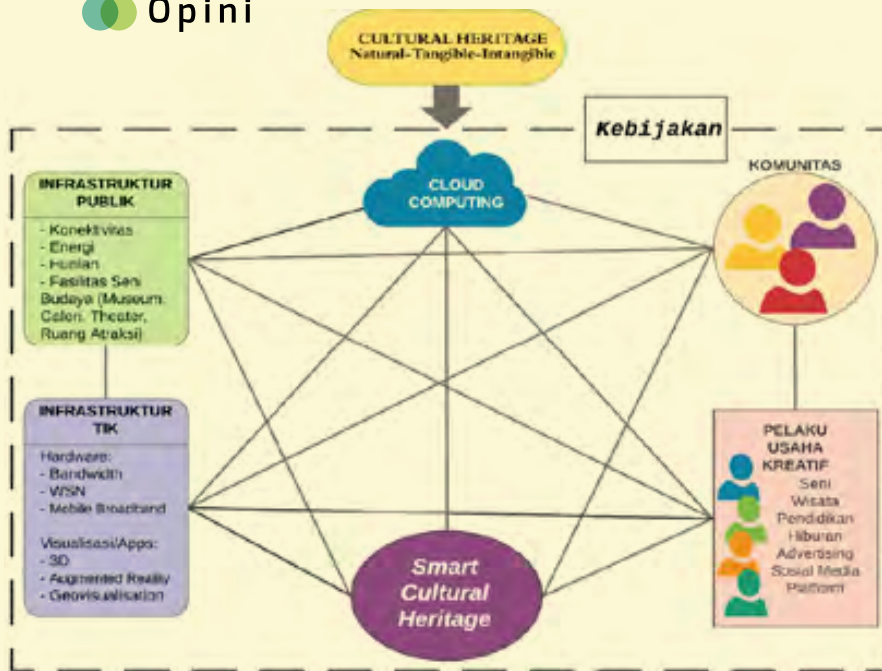
urban. Perencanaan pembangunan kota pintar harus disusun untuk mendukung pemajuan budaya yang ada. Tantangan yang ditemui adalah bagaimana mengintegrasikan pengembangan infrastruktur kota pintar dan implikasinya terhadap budaya dengan prinsip kota pintar kaya konten.

Kota pintar berbasis budaya diadopsi kota-kota di Eropa dengan melakukan preservasi, konservasi dan penyebarluasan informasi kota budaya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur TIK juga harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur publik lainnya yang mendukung kebutuhan situs budaya.

Organisasi pengembang budaya harus menggandeng instansi yang berwenang dalam membangun infrastruktur TIK dan infrastruktur publik. Dukungan penggunaan *cloud computing* dengan kebijakan *open data* yang dapat diakses oleh pengguna di seluruh belahan dunia, serta dorongan gaya hidup dalam *Internet of Things* yang mampu menjamah komunitas multi level dan segmen tanpa batasan wilayah dalam hitungan detik akan sangat menentukan kemajuan pengembangan wilayah tersebut.

Pengembangan *Smart Cultural City* hendaknya dilakukan dengan membangun infrastruktur pendukung budaya seperti fasilitas seni budaya antara lain museum, galeri seni, gedung pertunjukan, ruang terbuka, tempat atraksi, tempat pemutaran film, monumen dan sekolah seni. Selain itu, infrastruktur konektivitas, energi, listrik dan hunian juga tidak kalah pentingnya dalam mendukung pemajuan kota pintar berbasis budaya.

Implementasi infrastruktur di bidang teknologi informasi dalam penyediaan jaringan pita lebar, *mobile broadband*, *wireless sensor network* yang menjadi *backbone* dalam sebuah kota yang menghubungkan komunikasi data antar pengguna menjadi hal yang sangat vital. Ditambah dengan kemudahan visualisasi konten budaya yang dapat memanfaatkan Geovisualisasi, *3D Modeling*, *Augmented Reality* membuat hal tersebut menjadi jauh lebih menarik. Terakhir, edukasi terhadap masyarakat tentang kekayaan budaya yang dimiliki dan melatih kepekaan sejak dini merupakan *core value* yang tidak ternilai untuk investasi pengembangan sumber daya manusia di masa depan.



Perencanaan Terintegrasi

Menurut asesmen yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Infrastruktur di Inggris, teknologi sebagai salah satu faktor penggerak infrastruktur memberikan dampak antara lain: (i) dapat mereduksi kebutuhan pembangunan infrastruktur baru, (ii) mendorong permintaan infrastruktur pelengkap (iii) menurunkan biaya pembangunan infrastruktur (iv) mendorong permintaan sistem infrastruktur baru, (v) mampu mereduksi permintaan sistem infrastruktur (vi) menciptakan sistem infrastruktur yang lebih rentan.

Teknologi sebagai penggerak infrastruktur dan infrastruktur sebagai tulang punggung perkembangan teknologi memerlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi. Untuk menciptakan infrastruktur yang terintegrasi, diperlukan kerjasama antar pemangku kebijakan yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi agar dapat menghasilkan jaringan infrastruktur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan dinamis masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semua bentuk infrastruktur pada prinsipnya dibangun untuk tujuan yang sama yaitu konektivitas. Infrastruktur jalan, internet, energi, listrik, pengairan semua difungsikan untuk menghubungkan orang kepada hal yang dibutuhkan, memperpendek jarak, meningkatkan efisiensi dan menyatukan komunitas.

Kementerian PUPR bekerja sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dengan

tugas utama penyediaan infrastruktur pendukung pertumbuhan perekonomian, penyambung antar lini dan wilayah serta pemersatu rakyat. Disisi lain, pertumbuhan suatu perekonomian kreatif dan berbudaya tidak terlepas dari penyediaan infrastruktur pendukung, seperti penyediaan akses jalan ke lokasi budaya, penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi untuk pengunjung pertunjukan kebudayaan dan masih banyak lainnya.

Perencanaan dan pembangunan *smart cultural city* tidak akan pernah terlepas dari sumbangan jejak langkah sektor-sektor lainnya, hingga perlu penyatuan pemikiran dan sumbangsih yang nyata dalam bentuk pembangunan bertahap yang dapat disatukan dalam suatu rencana infrastruktur kewilayahan terintegrasi, perencanaan berbasis kawasan bukan hanya pada pusat wilayah/kota saja, dalam sebuah kawasan.

Dengan pembangunan infrastruktur yang berlomba dengan dampak lingkungan yang tidak terhindarkan, *smart culture city* nampaknya dapat menjadi sebuah pilihan yang dapat menjembatani masyarakat terhadap peningkatan kebutuhan ekonomi dengan nilai sosial budaya dalam sebuah kawasan yang dapat dijadikan motor penggerak ekonomi wilayah tanpa meninggalkan nilai-nilai kultural.

Akhir kata, Indonesia dengan keanekaragaman, keunikan dan kompleksitas budayanya seharusnya menjadi salah satu negara yang menyumbangkan kota-kota budaya sebagai bagian dari Kebudayaan Dunia. Rincian budaya Indonesia tidak akan habis ditulis melingkari indahnya candi Borobudur. Mulai dari keindahan alam, keanekaragaman tarian, cita rasa kuliner hingga berbagai keindahan tenun tradisional merupakan aset kebudayaan tak ternilai.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dukungan 'citra' identitas dan 'rasa' yang otentik dari masing-masing daerah, maka dapat menjadi bekal yang kaya dalam mendukung kota pintar berbudaya. Jika pelaut handal Bugis dengan perahu Phinisi telah melanglang buana menyusuri dunia, memperkenalkan cita rasa Indonesia hingga ke negeri Viking. Alangkah kecil langkah kita jikalau tidak dapat menjadikan kota-kota di Indonesia memenuhi lembar *World Cities Culture Forum*.

Sebuah Cermin untuk Pengelolaan Habitat Manusia Indonesia



Judul Buku :

Kaca Benggala: Perkembangan Habitat Manusia di Indonesia

Penulis :

Tjuk Kuswartojo

Penerbit :

Ukara Lawang Buana

Tahun Terbit : 247

Jumlah Halaman: 284 halaman

“Diharapkan muatan buku ini dapat memberi inspirasi bagi pembangunan pranata negara yang lebih utuh dan kokoh untuk menata habitat manusia.”

Kaca Benggala adalah cermin besar, yang dalam kisah Ramayana dimiliki oleh Rahwana yang digunakan oleh putra Hanoman untuk memantulkan kembali sorotan mata mematikan anak Dasamuka yang menjadi musuhnya. Kaca Benggala menjadi tameng sekaligus menjadi alat untuk menyerang balik lawannya. Kisah inilah yang kemudian menjadi filosofi dari penulisan buku Kaca Benggala ini. Buku ini dimaksudkan untuk membantu telaah, melihat diri sendiri, berkaca, sehingga dapat dikenali apa yang harus dikoreksi atau diperbaiki tentang habitat manusia di Indonesia.

Buku yang ditulis oleh Bapak Tjuk Kuswartojo ini, salah satunya menelaah perkembangan permukiman. Di dalamnya ada pembahasan bagaimana sebuah permukiman sejak zaman batu besar, bisa bertahan hingga abad 21. Selain itu juga dibahas mengenai bagaimana perjalanan negara-negara dalam menata habitat, bahkan dijabarkan sejak zaman perjuangan kemerdekaan RI hingga saat ini. Dalam proses penyusunan buku ini, penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Pusat Pengembangan Wilayah Perkotaan BPIW.

Secara umum, buku ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama merupakan wacana pembuka yang berisi beberapa alur sejarah, telaah habitat, dan tentang perkotaan. Bagian kedua berjudul Habitat Masyarakat Mandiri dan di Bawah Kerajaan, yang membahas di antaranya habitat mandiri, kerajaan pengaruh India, juga beberapa kesultanan islam di nusantara. Bagian ketiga, berjudul Habitat dalam Mempengaruhi Emporium, Imperium, dan Koloni.

Bagian ketiga membahas bagaimana habitat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan dimulai dari era perjuangan kemerdekaan, bagaimana peran kota pada saat itu. Dilanjutkan dengan kondisi dan kehadiran kota-kota di awal pemerintahan NKRI, era orde baru, hingga era reformasi dimana mulai ada perencanaan dan penataan perkotaan. Sedangkan bagian terakhir buku ini gambaran masa depan habitat manusia, ketika kota-kota besar telah berubah menjadi Megalitik dan Megapolitan.

Secara umum buku ini dibahas menggunakan bahasa khas Pak Tjuk Kuswartojo yang cukup filosofis dan kental nuansa sejarah. Diharapkan muatan buku ini dapat memberi inspirasi bagi pembangunan pranata negara yang lebih utuh dan kokoh untuk menata habitat manusia. **(Mutri Batul Aini)**

Jembatan Batam-Bintan

Urgensi Pembangunan Jembatan Batam-Bintan



Perspektif Global

01

Jembatan Batam-Bintan merupakan salah satu program prioritas dalam rangka **peningkatan konektivitas** mendukung **kelancaran arus barang** dan **jasa berorientasi ekspor** di KPBPB BBK, serta mendukung **optimalisasi koridor ekonomi Sumatera** sebagai salah satu koridor **ASIAN Highway**.

Lokasi strategis Pulau Batam dan Bintan, yaitu terletak di Selat Malaka yang merupakan **jalur perdagangan tersibuk di dunia** dan berdekatan dengan Singapura yang merupakan **pusat bisnis Asia Tenggara** dan dilalui pelayaran dan perdagangan internasional, merupakan **peluang yang harus ditangkap** oleh Pemerintah Indonesia.



Perspektif Nasional

02

Pembangunan Jembatan Pulau Batam – Pulau Bintan dimaksudkan untuk **meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara**, kawasan tertinggal dan terisolasi. *(RTR Pulau Sumatera)*



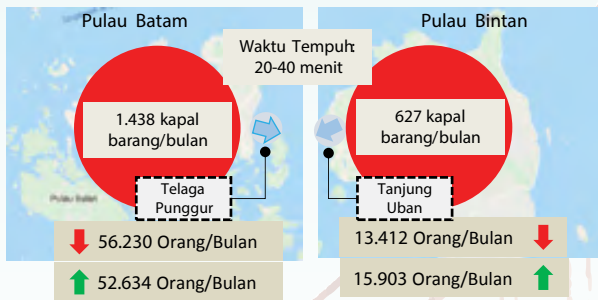
Perspektif Regional

03

Salah satu kebijakan pengembangan wilayah di Kepulauan Riau adalah **mendorong** terbentuknya **aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan** melalui pembangunan **jembatan penghubung antar pulau**, meliputi **Jembatan Batam - Bintan (P. Batam – P. Tanjung Sau - P. Buau – P. Bintan)**. *(RTRWP Kepulauan Riau 2017-2037)*

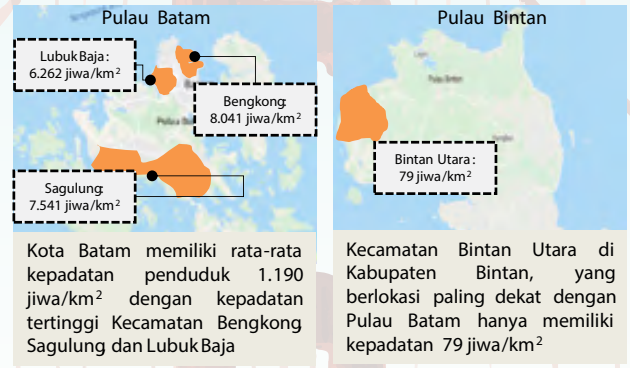
Isu Strategis Pengembangan Kawasan Batam-Bintan

1. Mobilitas Barang/Jasa dan Orang di Batam-Bintan



Keterangan: ↓ Jumlah Penumpang Turun; ↑ Jumlah Penumpang Naik
 Sumber: Statistik Angkutan Udara dan Laut Provinsi Kep. Riau 2016

2. Potensi Pulau Bintan Sebagai Lokasi Permukiman Bagi Para Pekerja di Batam



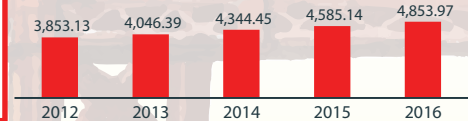
Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2017

3. Potensi Pengembangan Sektor Ekonomi (Pariwisata dan Industri) di Pulau Bintan



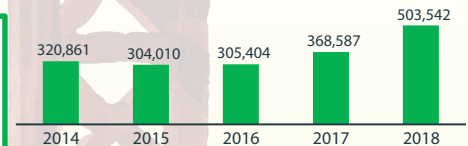
Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Bintan (Milyar)

Pertumbuhan 2012 - 2016
20,61%



Perkembangan Jumlah Wisman yang Masuk Ke Bintan (Orang)

Pertumbuhan 2014 - 2018
36,27%



WITH AND WITHOUT PEMBANGUNAN JEMBATAN BATAM-BINTAN (IDENTIFIKASI AWAL)

Batam

Bintan

without	Waktu tempuh 20-40 menit dengan ferry	Waktu tempuh 20-40 menit dengan ferry	without
	Proyeksi investasi US\$ 7,29 milyar tahun 2030*	Proyeksi investasi US\$ 4,10 milyar tahun 2030*	
with	Waktu tempuh 15-20 menit dengan mobil	Waktu tempuh 15-20 menit dengan mobil	with
	Proyeksi investasi US\$ 73,94 milyar tahun 2030**	Proyeksi investasi US\$ 41,58 milyar tahun 2030***	

* Untuk proyeksi investasi without Jembatan Batam-Bintan, perkiraan pertumbuhan investasi diasumsikan sebesar 5%/th (sumber: Bank Indonesia Kanwil Prov. Kepri, 2018), dengan menggunakan basis data "Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri" (sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka).

** Sumber: BP Batam

*** Asumsi: sama dengan proyeksi investasi Batam, dengan kenaikan 10x lipat

Menikmati Pesona Golden Sunrise di Bromo



Sunrise di Bromo

Sumber: BPIW

Destinasinya Gunung Bromo merupakan lokasi wisata populer yang menyimpan keindahan alam yang sayang untuk dilewatkan. Gunung berapi yang masih aktif ini secara administratif berada di empat wilayah kabupaten di Jawa Timur, yakni Kabupaten Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang menjadi tempat wisata terkenal di Jawa Timur.

Taman seluas 800 meter ini hampir tidak pernah sepi di tiap harinya. Ketinggian gunung ini mencapai 2.392 mdpl dan memiliki konstruksi tubuh yang bersinggungan di antara lembah dan ngarai lalu dikelilingi kaldera atau lautan pasir luas kurang lebih sekitar 5.300 hektar. Untuk beberapa destinasi wisata yang dapat kita kunjungi di sekitar Gunung Bromo antara lain:

1. Menara Pandang Seruni Point Bromo

Berburu indahnya matahari terbit menjadi salah satu kegiatan yang sayang untuk dilewatkan saat berada

di kawasan Bromo Tengger, Jawa Timur. Untuk menikmati keindahan tersebut, salah satunya dengan melihat langsung dari atas bukit-bukit yang ada disana.

Ada spot baru untuk melihat keindahan Bromo, salah satunya melalui puncak Seruni Point yang terletak di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Puncak Seruni Point diresmikan langsung oleh Bupati Probolinggo tahun 2018, dimana kita harus menapaki sebanyak 256 anak tangga jika ingin melihat indahnya panorama Bromo berupa lautan pasir, matahari terbit dan tenggelam.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut melalui program Preservasi Rehabilitasi Jalan Gempol-Bangil-Pasuruan-Probolinggo, Pengembangan Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru, dan Penanganan Sanitasi Kawasan KSPN Bromo.

Gunung Bromo merupakan destinasi wisata yang wajib dikunjungi karena keindahan alam yang mempesona. Dalam hal ini kementerian PUPR turut mendukung berbagai program di KSPN gunung Bromo diantaranya rehabilitasi jalan, penanganan sanitasi, dan penataan bangunan.

Kemudian ada Penataan Bangunan Kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo meliputi Pekerjaan Menara Pandang, Pekerjaan Pagar Keliling, Pekerjaan Dinding Gapura, Pekerjaan Tangga Partial, Pekerjaan Tangga Partial dan Railing.

Puncak Seruni Point adalah *beautiful view point* yang menyerupai *The Great Wall* atau tembok raksasa di China, dengan hamparan hutan pinus nan hijau serta sejuknya udara yang menemani kita saat melewati ratusan anak tangga.

2. Pasir Berbisik

Kawasan Puncak Gunung Bromo terkenal dengan julukan Pasir Berbisik di kalangan wisatawan. Pasir berbisik merupakan sebuah lautan pasir luas indah yang berada di sekitar Kaldera Gunung Bromo.

Fenomena pasir berbisik tercipta konon karena ketika angin bertiup, butiran-butiran pasir berterbangan dan terdengar seperti bisikan yang sampai ke telinga setiap orang yang melewatinya. Bentuknya juga bergelombang menyerupai ombak-ombak kecil.

Tidak hanya menjadi lokasi syuting film yang berjudul sama, Pasir Berbisik juga biasa digunakan sebagai objek bagi para fotografer atau orang-orang yang ingin hunting foto.

Untuk mengunjungi Lokasi Pasir Berbisik Gunung Bromo sangatlah mudah, bahkan bisa ditempuh dengan berjalan kaki, akan tetapi kebanyakan wisatawan menggunakan jasa transportasi wisata sejenis Motor Trail, Jeep Bromo, dan Kuda Bromo.

3. Bukit Savana "Teletubbies"

Selain lautan pasir, Bromo juga memiliki sebuah bukit yang dinamakan Bukit Teletubbies yang tidak kalah cantiknya. Bukit ini dinamakan Bukit Teletubbies karena

penampakkannya mirip dengan bukit berwarna hijau yang ada di film kartun Teletubbies.

Lokasi ini sangat cocok digunakan untuk mereka yang mencari lokasi terpencil (santai) dan terbebas dari suasana yang sibuk dan padat. Itu berarti relaksasi menjadi alasan utama mengapa wisatawan mengunjungi padang rumput ini. Pemandangan hijau ini tentu saja terlihat kontras dengan keadaan alam di sekelilingnya yang dominan berwarna abu-abu dan gelap.

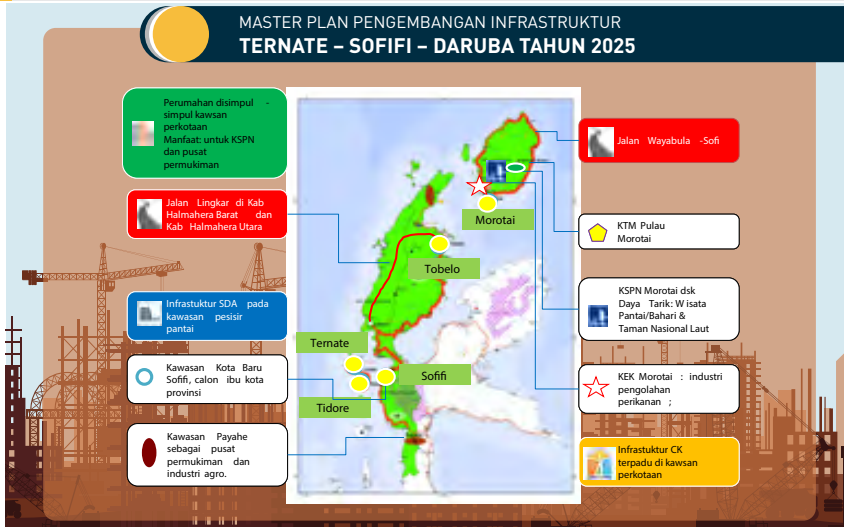
Kontrasnya pemandangan ini membuat bukit Teletubbies menjadi primadona di mata wisatawan. Hijainya bukit Teletubbies ini menjadi sasaran *selfie* para wisatawan yang datang untuk memanjakan mata sambil menikmati keindahan alam bukit teletubbies yang terpampang nyata. **(Indira/InfoBPIW)**



Pasir Berbisik

Sumber: BPIW

BPIW Dukung Percepatan Pembangunan di Maluku



Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan, pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut ditangani empat sektor secara terpadu, meliputi penanganan konektivitas atau jalan nasional, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan permukiman atau reciptakaryaan, serta penyediaan perumahan.

Hadi menjelaskan, isu strategis pengembangan wilayah di Maluku Utara antara lain dukungan terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai, Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) Morotai, dan Kawasan Industri (KI) Buli. Kemudian ada juga dukungan konektivitas multimoda Pelabuhan Umum A. Yani dan Ternate dan dukungan terhadap Kota Baru Sofifi. Selain itu, dukungan terhadap Pulau Kecil Terluar Yiew Besar serta dukungan infrastruktur di kawasan rawan bencana alam. **(Daris/Hendra)**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan percepatan pengembangan infrastruktur PUPR terpadu di Provinsi Maluku Utara (Malut). Saat ini percepatan pembangunan infrastruktur merupakan suatu kebutuhan dalam mengejar ketertinggalan.

Program Konreg Siap Dilaksanakan di Kalteng

Konsultasi Regional (Konreg) yang dilaksanakan BPIW pada Februari dan Maret lalu, menghasilkan beberapa program 2020 dan usulan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang masuk *baseline* (program yang akan masuk tahun 2020). Program-program tersebut diantaranya Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Mentawa Baru Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur. Pembangunan sektor Bina Marga yakni Pembangunan Jalan Tumbang Hiran-Tumbang Samba Segmen 1. Kemudian untuk sektor Cipta Karya yakni Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Jaringan Perpipaan di Kota Waringin Timur.

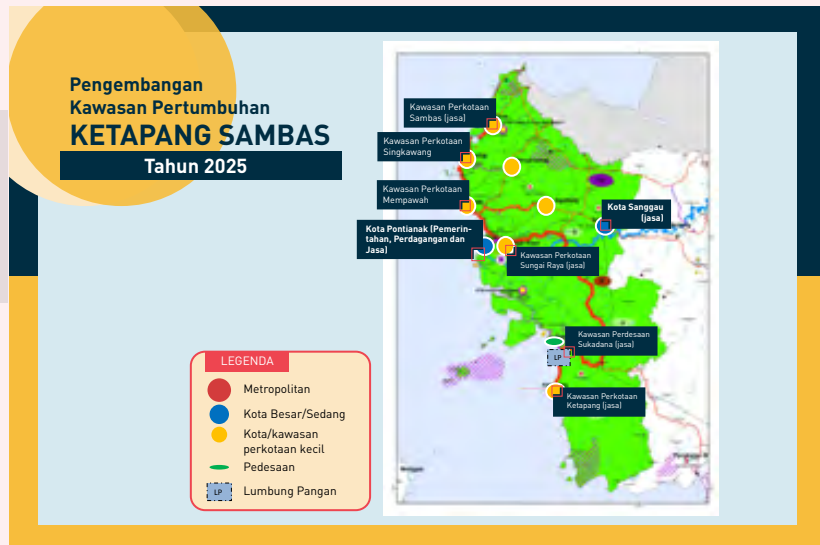


Gubernur Kalteng Sugianto Sabran berharap seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalteng dapat merencanakan pembangunan secara merata di berbagai sektor baik infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan bidang pendapatan belanja daerah yang ada harus digunakan sesuai fungsinya. **(Daris/Hendra)**

Penanganan Desa Tertinggal di Kalbar

Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa tantangan, seperti masih adanya ratusan desa yang sangat tertinggal. Untuk itu salah satu program yang akan dilakukan Kementerian PUPR tahun 2020 di provinsi ini adalah Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) seperti di Sambas, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Selain itu akan dibangun Rumah Khusus Nelayan di Desa Suka Baru Kecamatan Banua Kayong Kabupaten Ketapang.

Hal ini dilakukan mengingat kabupaten tersebut merupakan yang termiskin di Kalimantan Barat. Selain itu, juga akan dilakukan pembangunan Pengaman Pantai Kabupaten Sambas, dan program Peningkatan Kualitas Rumah (termasuk KPPN Mempawah dan Bengkayang). Kepala BPIW Hadi Sucahyono, mengatakan Pembangunan



infrastruktur PUPR memperhatikan arahan agenda pembangunan secara global dan memperhatikan potensi daya dukung wilayah yang tangguh terhadap bencana.

Namun yang terpenting adalah pembangunan infrastruktur PUPR berkontribusi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi (peningkatan Produk Domestik Bruto atau PDB) dan berperan dalam pengurangan kemiskinan serta peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia). **(Daris/Hendra)**

Penyerapan Dana ITDP bakal Maksimal

BPIW Kementerian PUPR memastikan penyerapan dana *loan* untuk *Integrated Tourism Development Project* (ITDP) dari Bank Dunia akan maksimal, tahun ini. Ruang lingkup ITDP meliputi penyusunan tiga *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP), yakni ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, ITMP Danau Toba dan ITMP Lombok.

Ada beberapa kementerian dan lembaga terlibat dalam ITDP, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

BPIW saat ini sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mewujudkan penyerapan *loan* ITDP yang maksimal, antara lain mendorong Kementerian Pariwisata untuk segera



memulai proses pengadaan atas *sub-project* yang telah disetujui.

Kemudian, mendorong BKPM untuk mengusulkan kembali *sub-project*. Selain itu, BPIW juga mempercepat penyelesaian dokumen *readiness criteria* bersama Ditjen Bina Marga untuk penggantian Jembatan Tano Ponggol – Toba. **(Daris)**

Kota Pusaka Terus Dikembangkan



Saat ini pengembangan kota termasuk kota tematik mendapat dukungan dari Bank Dunia melalui *National Urban Development Program* (NUDP).

Untuk pengembangan kota bertema Kota Pusaka, BPIW merasa perlu berkolaborasi dengan Dirjen Kebudayaan dalam menentukan prioritas Kota Pusaka yang paling efektif dan efisien untuk dikembangkan. Dengan berkolaborasi diharapkan mendapatkan hasil maksimal terkait pengembangan kota pusaka tersebut.

Ada empat komponen utama dalam NUDP antara lain, penyiapan kebijakan, kelembagaan dan finansial, serta sistem informasi dan perencanaan. Dirjen Kebudayaan menyambut hangat dan siap melakukan sinkronisasi dan kolaborasi dalam pengembangan Kota Pusaka. **(Daris)**

Bank Dunia Mendukung BPIW Miliki Data yang Akurat

BPIW dengan Bank Dunia melakukan kerja sama menggelar *knowledge sharing* terkait pengembangan perkotaan di masa depan. kegiatan tersebut diharapkan mampu menambah pencerahan dan cara yang efektif bagi jajaran BPIW dalam upaya melakukan pengembangan infrastruktur PUPR di Tanah Air khususnya pengembangan perkotaan.

Direktur *City Planning Lab World Bank*, Gayatri Singh mengatakan, Bank Dunia mendukung BPIW Kementerian PUPR memiliki aplikasi yang dilengkapi data-data akurat sehingga membantu para pengambil keputusan dalam melakukan proses perencanaan pembangunan. Gayatri menambahkan, aplikasi-aplikasi di BPIW saat ini dalam proses pengembangan sehingga dukungan aplikasi data perkotaan sangat tepat untuk diintegrasikan.



Konsultan Pengembangan Kota Bank Dunia, Ricardo mengatakan, perencanaan yang baik harus didukung data yang akurat. Dukungan data akurat akan menghindari terjadinya perencanaan tidak sesuai sasaran. Data akurat mampu menampilkan angka pasti dalam pelaksanaan pembangunannya. **(Mutri)**

Pengembangan Kota di Indonesia Dapat Dukungan Bank Dunia



Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, NUDP akan banyak melibatkan peran kementerian/lembaga, terutama Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian ATR/BPN serta Kemendagri. Dengan demikian, program NUDP tersebut akan mempercepat pengembangan kota yang memiliki karakter berkelanjutan, berciri khas, layak huni, hijau, dan cerdas. Dalam NUDP ini terdapat

empat komponen utama, yakni menyiapkan kebijakan, kelembagaan, dan finansial. Kemudian, menyiapkan sistem informasi dan perencanaan. (Daris)

Bank Dunia siap merealisasikan dukungan Anggaran untuk pengembangan kota-kota di Indonesia. Komitmen itu diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Bank Dunia untuk *National Urban Development Program (NUDP)*.

Pengelolaan ITDP Mendapat Apresiasi

Bank Dunia mengapresiasi Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang telah mengelola proses *loan Integrated Tourism Development Project (ITDP)* sesuai harapan. Kepala BPIW Hadi Sucahyono menerangkan, BPIW Kementerian PUPR saat ini sudah mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan penyerapan anggaran ITDP dengan maksimal.

Langkah yang dilakukan seperti mendorong Kementerian Pariwisata untuk segera memulai proses pengadaan atas *sub-project* yang telah disetujui. Kemudian, mendorong BKPM untuk mengusulkan *sub-project*. Selain itu, melakukan percepatan penyelesaian dokumen bersama Ditjen Bina Marga untuk penggantian Jembatan

PRIORITAS PENYUSUNAN INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN (3 LOKASI)

🔥 LOMBOK
🔥 DANAU TOBA
🔥 BOROBUDUR

Supervolcano Geopark

DANAU TOBA

Danau Toba mencakup kawasan Danau Toba dan sekitarnya (Perpres No.81 Tahun 2014).

Terdapat 3 (tiga) kawasan prioritas, yaitu:

- ▲ Parapat (Kec. Girsang Sipangan Bolon) sebagai pintu utama menuju Pulau Samosir, sekaligus fokus pengembangan infrastruktur wisata.
- ▲ Pulau Samosir, khususnya Kecamatan Simaninda dan Pangururan (desa wisata) memiliki atraksi seperti Kursi Batu Raja Siialagan dan Makam Raja Sidabutar. Selain itu terdapat Desa Ambarita yang memiliki budaya adat Batak yang kental, Pantai Parbaba, Pemukiman Air Panas di Gunung Pusuk Buhit, dan desa wisata Tukuk.
- ▲ Kecamatan Balige, Terdapat Bandara Silangit, Bandara terdekat menuju ke Danau Toba. Selain itu terdapat Museum yang menawarkan beragam model arsitektur Batak.

Maritim

LOMBOK

Pulau Lombok mencakup 4 (empat) destinasi wisata utama, yakni:

- ✳️ Kepulauan Gili
- ✳️ KEK Mandalika
- ✳️ Pantai Senggigi
- ✳️ Taman Nasional Rinjani

Pulau Lombok memiliki populasi penduduk sekitar 3,3 juta penduduk dengan luas pulau 4.379 km². Daya tarik wisata di Pulau Lombok, khususnya di Kepulauan Gili dan Senggigi adalah wisata bahari, seperti pantai dan tujuan untuk menyelam. Saat ini sedang dilakukan pembangunan hotel skala besar oleh (ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) di Mandalika.

MAHAKARYA ARSITEKTUR (KONSERVASI)

DANAU TOBA

Kawasan Borobudur dan sekitarnya, direncanakan dengan visi 'The Capital Buddhist Heritage in The World' memiliki 3 atraksi utama, yaitu:

- ▲ Kawasan Borobudur, termasuk Candi Borobudur sebagai UNESCO World Heritage Site, Candi Pawon dan Candi Mendut, serta desa-desa adat di sekitarnya.
- ▲ Candi Prambanan dan Ratu Boko (UNESCO World Heritage Site), Candi Sewu, Candi Bubrah dan Candi Lumbung.
- ▲ Yogyakarta dengan atraksi utama Kraton Kesultanan Yogyakarta seluas museum, Taman Sari, dan Kawasan Wisata Belanja Malioboro.

Tano Ponggol yang merupakan salah satu *sub-project* terpenting untuk ITDP di Danau Toba. Termasuk mendorong Ditjen Cipta Karya melakukan penyusunan *sub-project* yang bersifat *urgent*. (Daris)

Pembangunan PLBN Tahap Dua Sasar Oepoli dan Napan

DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN
10 KAWASAN PERBATASAN (PKSN) 2015-2019



16 PKSN
Persiapan Pengembangan

PKSN	PKSN	PKSN	PKSN
Jagoi Babang	Long Pahangai	Tanah Merah	Kalabahi
Jasa	Simanggaris	Dumai	Ilwaki
Long Nawang	Kefamenanu	Batam	Dobo
Long Midang	Merauke	Melonguane	Daruba

Source: Rencana Induk Perbatasan 2015-2019

Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, akan dilakukan pembangunan tahap kedua yaitu untuk PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang dan PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Guna mendukung pengembangan dua PLBN ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menyusun rencana pengembangan pusat-pusat permukiman di sekitar PLBN.

Kawasan perbatasan Oepoli masih memiliki permasalahan terkait penentuan garis batas negara RI, sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kemenko Polhukam serta Kementerian Luar Negeri agar penentuan lokasi pembangunan PLBN juga dapat segera diselesaikan. Untuk wilayah Napan kendala yang dihadapi adalah terkait kesepakatan harga tanah milik warga yang akan dibebaskan. **(Ajeng/Mutri)**

Untuk mendukung salah satu agenda Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas

Pengembangan Wilayah Berkelanjutan

Realisasi membangun dari pinggiran terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). BPIW kini menyusun Rencana Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana tersebut disusun berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan kota-kota sekitarnya.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, pengembangan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kabupaten Rote dilakukan



sesuai dengan potensi unggulan kawasan, berbasis pengembangan wilayah berkelanjutan. *Masterplan* disusun untuk meningkatkan fungsi kota kecil di PPKT dan wilayah sekitarnya. Dengan adanya *masterplan* ini pengembangan perkotaan dapat lebih terintegrasi. **(Ajeng)**

MENGELOLA KEUANGAN SETELAH LIBUR PANJANG

Liburan tentu saja menjadi momen-momen yang menyenangkan. Karena kita dapat melepaskan kepenatan kerja dan menikmati hari-hari santai bersama keluarga. Namun, cobalah mengecek kembali kondisi keuangan anda saat ini. Mengingat liburan tentu saja menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Apalagi, jika anda telah mengeluarkan uang yang melebihi dari *budget* liburan yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut, tips-tips mengelola keuangan setelah libur panjang.

1. Membuat Catatan Pengeluaran

Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencatat semua pengeluaran saat kita liburan. Bandingkan dengan anggaran (*budget*) yang sudah kita buat di sebelum liburan. Jika memang berlebih, maka mau tidak mau kita harus menggunakan anggaran dari pos lain. Jika memang ada sisa anggaran, belanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih produktif misalnya, untuk menabung atau investasi.

2. Selesaikan Masalah Utang untuk Liburan

Sebenarnya, sangat tidak direkomendasikan menggunakan utang sebagai biaya liburan. Namun, jika kita menggunakan cara ini, sebisa mungkin selesaikan terlebih dahulu utang-utang tersebut. Jika tidak segera dilunasi, nantinya akan semakin besar cicilan yang harus kita bayar. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah mencoba mulai menabung. Cobalah menghilangkan anggaran untuk sesuatu yang masih bisa ditunda. Pangkas juga anggaran yang kurang perlu. Jika pengeluaran selama liburan melebihi dari anggaran, mau tidak mau kita harus memangkas pengeluaran untuk beberapa bulan ke depan. Dengan begitu kebutuhan utama tetap terpenuhi tanpa harus mengambil uang dalam rekening tabungan. Selain itu, kontrol diri anda agar tidak mudah tergoda untuk membeli barang-barang di luar kebutuhan utama.

3. Penuhi Lagi Dana Simpanan yang Terpakai untuk Liburan

Jika selama liburan menggunakan dana simpanan, setelahnya kita jangan lupa untuk memenuhi kembali dana simpanan tersebut. Sebenarnya, bukanlah tidak benar menggunakan dana simpanan asalkan anda mau segera mengembalikannya. Jangan sampai dana simpanan dalam kondisi kurang karena akan sangat

bermanfaat saat terdapat kondisi yang mendesak nantinya. Saldo dana tabungan kita haruslah enam kali lipat dari pemasukan yang didapatkan.

4. Manfaatkan Promo atau Diskon untuk Berhemat setelah Liburan

Cara terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan promo atau diskon yang sedang berlangsung. Cara ini nantinya bisa menekan biaya pengeluaran selama sebulan. Carilah informasi sebanyak mungkin di tempat-tempat pusat perbelanjaan yang sedang menyediakan promo atau diskon.

5. Disiplin dan Komitmen

Cara mengatur keuangan selanjutnya adalah dengan cara disiplin dan komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat kita boros. Jika sudah menentukan seperti itu, maka mulailah disiplin untuk tidak tertarik mengutang hal-hal yang tidak perlu. Komitmen untuk tidak belanja, investasi, tabungan, asuransi dan belanja-belanja kebutuhan produktif yang bermanfaat bagi masa depan. Lakukanlah perubahan keuangan jika ingin mengatur keuangan menjadi lebih stabil dan normal kembali. **(Indira/dikutip dari beberapa sumber)**

Sangat tidak direkomendasikan menggunakan utang sebagai biaya liburan. Namun, jika kita menggunakan cara ini, sebisa mungkin selesaikan terlebih dahulu utang-utang tersebut. Jika tidak segera dilunasi, nantinya akan semakin besar cicilan yang harus kita bayar.



Inilah 5 Kota Pusaka Terkenal di Tanah Air

Saat ini tercatat ada 70 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Puluhan anggota JKPI itu memiliki warisan budaya, tata kota, bangunan, tradisi yang unik dan bernilai.

Untuk mengembangkan kota bertema Kota Pusaka, pemerintah daerah memiliki peranan besar untuk melakukan pelestarian cagar budaya dan bangunan cagar budaya, melakukan penataan dan

pelestarian pusaka sebagai strategi utama dalam pengembangan kotanya.

Dari banyak kota pusaka yang dimiliki Indonesia, ada lima Kota Pusaka dengan pemerintah daerah yang aktif melakukan festival budaya dan kegiatan lainnya hingga kota tersebut dikenal banyak kalangan. Berikut kelima Kota Pusaka terkenal di Tanah Air versi Sinergi.



1. Semarang

Pemerintah melalui Kementerian PUPR saat ini gencar melakukan penataan kawasan Kota Lama Semarang, Jawa tengah. Penataan Kota Lama Semarang yang dilakukan sejak tahun 2017 itu diharapkan akan meningkatkan aktivitas pertumbuhan ekonomi yang ada di Semarang.

2. Ternate

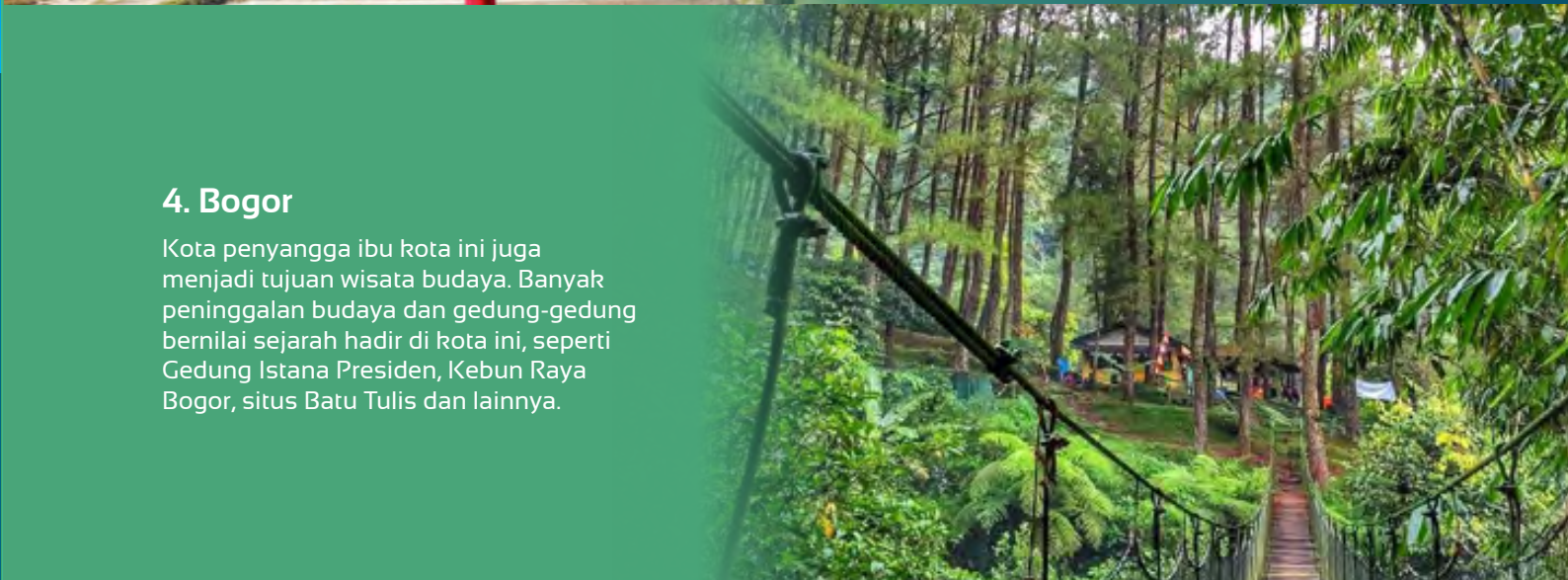
Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu kota yang dikembangkan menjadi Kota Pusaka. Wilayah ini memiliki banyak peninggalan cagar budaya dan sejarah masa lampau, seperti Benteng Oranje dan lainnya.





3. Yogyakarta

Kota Gudeg ini sejak lama menjadi tujuan wisata budaya baik wisatawan domestik ataupun mancanegara. Kota ini dikenal memiliki warisan budaya bernilai tinggi seperti hadirnya candi-candi, keraton dan lainnya.



4. Bogor

Kota penyangga ibu kota ini juga menjadi tujuan wisata budaya. Banyak peninggalan budaya dan gedung-gedung bernilai sejarah hadir di kota ini, seperti Gedung Istana Presiden, Kebun Raya Bogor, situs Batu Tulis dan lainnya.



5. Tampaksiring

Kota ini memiliki banyak cagar budaya peninggalan Kerajaan Udayana yang bernilai sejarah. Salah satunya Pura Tirta Empul Tampak Siring yang selalu ramai didatangi wisatawan. Selain itu banyak juga ilmuwan domestik dan manca negara yang datang di kota ini untuk meneliti keunikan tradisi dan budaya masyarakatnya. **(Daris/ dari berbagai sumber)**

SEMBURAN LUMPUR SIDOARJO SEBAGAI MATERIAL KONSTRUKSI

Sejak tahun 2006, semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo telah menyisakan banyak persoalan dan dampak negatif yang luas, terutama terhadap masyarakat terdampak langsung di sekitar lokasi bencana.

Semburan Lumpur Sidoarjo, atau yang dikenal dengan Lusi, merupakan bencana jenis baru dengan volume semburan kurang lebih 100.000 m³/hari dan suhu semburan sekitar 100°C, serta mencakup wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 601 ha yang meliputi 12 desa di tiga kecamatan (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo/ BPLS, 2011).

Pusat semburan yang tepat berada di pusat permukiman yang padat penduduk, sentra industri serta akses infrastruktur nasional. Semburan lumpur panas tersebut menyebabkan ribuan bangunan rusak, ratusan hektar sawah kehilangan produktivitasnya, dan puluhan ribu kepala keluarga (KK) terpaksa harus direlokasi. Mengingat bahwa permasalahan yang ditimbulkan oleh luapan Lusi memiliki dimensi yang luas dan implikasi yang panjang, pemerintah

melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, juga masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur. Kemudian, melalui Perpres No. 21 Tahun 2017, tugas dan fungsi BPLS ini diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dimasukkan dalam struktur baru yang diberi nama Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Perlu diketahui, bencana ini (dan dampaknya) diperkirakan akan terus berlangsung selama 20 tahun. Artinya, bencana ini diperkirakan akan berhenti pada tahun 2026 mendatang. Sejak didirikan, BPLS telah melakukan berbagai upaya penanganan dampak luapan Lusi, mulai dari pembuatan waduk penampung lumpur hingga penanganan endapan di muara sungai. Dalam rencana induk penanganan Lusi yang dikeluarkan oleh BPLS menyebutkan prinsip

kesatuan penanganan Lusi yang harus memperhatikan tata kelola lingkungan, diantaranya adalah *reduce, reuse, recycle, repair* dan *renewable*. Berdasarkan prinsip tersebut, pemanfaatan kembali (*reuse*) material mentah yang melimpah menjadi material lain yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dijadikan salah satu alternatif penanganan dampak semburan Lusi. Perlu diketahui hal lainnya yang perlu diperhatikan, kapasitas waduk penampung Lusi yang dibangun oleh BPLS memiliki kapasitas 54 juta m³. Dengan demikian, potensi Lusi untuk dapat dimanfaatkan sangat besar.

Upaya untuk memanfaatkan semburan Lusi telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Kementerian PUPR. Sejak tahun 2007, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (Puskim) telah melakukan beberapa penelitian untuk memanfaatkan potensi yang besar tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Lusi dapat dikembangkan sebagai bahan bangunan keramik berupa genteng, bata merah, agregat, dan panel ringan.

Karena lumpur tersebut sangat halus dan memiliki sifat kepekaan pengeringan serta nilai susut yang tinggi, maka diperlukan bahan tambahan berupa abu batu bara atau bahan lain terutama bahan yang mengandung unsur utama silika untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitasnya.

Pengembangan bahan bangunan berbasis Lusi harus memperhatikan kondisi lingkungan, teknik produksi, ekonomi dan sistem konstruksi dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku, agar memenuhi kriteria dan kaidah bangunan yang layak dan terjangkau.

Sementara itu, upaya eksplorasi bahan lumpur harus menjaga kondisi lingkungan sehingga dampak negatif seminimal mungkin. Sosialisasi teknologi serta peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat perlu dilakukan untuk menyediakan tenaga yang memadai dalam pengembangan usaha. Jenis produk yang akan dikembangkan

perlu dikaji secara teknis dengan mengacu terhadap animo masyarakat dan kebutuhan pasar sehingga kelangsungan usaha dapat dijamin.

Produk bahan bangunan dari Lusi diterapkan melalui pembangunan rumah contoh dengan konsep Risha di Sidoarjo.

Panel Risha yang dibuat dengan campuran beton ringan Lusi, menghasilkan perilaku yang cukup baik dan lebih ringan dibandingkan dengan beton agregat alam. Pembangunan rumah contoh dengan konstruksi sistem Risha dari beton ringan Lusi dapat dilaksanakan dengan waktu yang cepat.

Untuk mendukung upaya produksi bahan bangunan berbasis Lusi serta penerapannya, maka Puskim memanfaatkan bangunan unit produksi yang dibangun sebelumnya (tahun 2016) untuk memproduksi bahan bangunan tersebut. Selain itu juga dilakukan pelatihan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta menjamin kualitas bahan bangunan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan teknis.

Pelatihan produksi bahan bangunan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar, meskipun dirasakan kurangnya waktu praktik. Dari hasil uji coba pada saat kegiatan pelatihan, peralatan produksi bahan bangunan memiliki kinerja dan kapasitas yang baik, meskipun tetap harus dibuktikan pada skala produksi.

Harga satuan agregat ringan Lusi yang dibuat di Cilacap masih sangat mahal bila dibandingkan dengan agregat alam. Namun bila dikembangkan di masa depan dengan peralatan dan teknologi baru serta dekat dengan lokasi bahan baku lumpur Sidoarjo, maka harga jualnya akan kompetitif. **(Peneliti Ir. Bambang Sugiharto, MT, Lasino, ST, APU.)**

Lusi dapat dikembangkan sebagai bahan bangunan keramik berupa genteng, bata merah, agregat, dan panel ringan. Karena lumpur tersebut sangat halus dan memiliki sifat kepekaan pengeringan serta nilai susut yang tinggi.

BPIW Terus Optimalkan Kinerja Organisasi



Upaya meningkatkan sinergitas dan efektivitas program kerja 2019, seluruh unit kerja di lingkungan BPIW melakukan rapat koordinasi dengan Kepala BPIW, Hadi Sucahyono di Kantor BPIW, April lalu. Rakor tersebut berlangsung selama dua hari yang diawali dari Pusat 3, Pusat 4 dan Setba. Pada hari kedua rakor dilakukan dengan Pusat 1 dan Pusat 2. (ris)



Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengapresiasi kinerja jajaran Setba dan mendorong untuk meningkatkannya.



Jajaran Pusat 1 melaporkan perkembangan capaian kinerja tahun 2019.



Jajaran Pusat 2 memaparkan rencana dan capaian kinerja 2019.



Pusat 3 melaporkan penajaman dan update untuk dokumen masterplan kawasan strategis.



Pusat 4 menyampaikan perkembangan capaian kinerja 2019.



QUIZ BPIW


 EDISI 39



PERTANYAAN

1. Sebutkan dasar hukum yang memuat tugas dan fungsi BPIW !
2. Sebutkan nama pusat di BPIW yang menangani pemrograman dan evaluasi !
3. Sebutkan nama Kepala BPIW yang ke-3 (yang saat ini menjabat) !

KETENTUAN



Dua orang pemenang akan mendapatkan *souvenir cantik* dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : humasbpiw@pu.go.id. Jawaban juga dapat disampaikan melalui *WhatsApp No: 0812-9897-4748* disertakan *scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir*. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 40, Juni-Juli 2019.

JAWABAN KUIS EDISI 38

Jawaban

1. Kota Baru Mandiri Sofifi
2. KSPN Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan Borobudur
3. Rest Area Rambut Siwi (Jembrana, Bali) dan Rest Area Tugu (Trenggalek, Jawa Timur)

PEMENANG KUIS EDISI 38

1. Rezky Rendra
Komplek Deplu, Kebayoran Lama
 2. Brianita Nafisa Dewi
Kebayoran Baru
- 

Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

BANG EGI



Renstra PUPR





Sumber: Istimewa

Cintaku Terpaut di Wakatobi

PUISI

Untaian kata-kata indah dalam balutan puisi hasil karya insan Kementerian PUPR terutama BPIW ditampilkan disini. Ini salah satunya:

Untukmu, aku senandungkan tembang gembira dari bumi Wakatobi, menyentuh dinding goa air bening Kontamale, menggetarkan akar rambut yang menggantung di langit-langit tudung karang Wasabinua. Setelahnya lembab tanah berubah segera bagai rekan kerja.

Namamu menjadi bagian dari syair-syair yang dilantunkan. Tiba saatnya harapan ditorehkan kembali dalam karya dan cinta. Kamu menjelma menjadi aksara dan angka dalam setiap gagasan tentang bahagia.

Terimalah persembahan lagu berdasar jiwa, reguklah sebagai penawar tuba dari prasangka. Tunggu aku mematut sukma. Usai sudah duka, babak baru suka. Henggang sudah durga, murka.

Di puncak tertinggi Kahyangan Tomia, aku rapatkan diri pada bebatuan, di antaranya aku tuliskan namamu yang kelak merupa prasasti; bahwa aku terpaut pada sang dewi pemilik ucapan janji sehidup semati.

Gemuruh riak air di pantai Waha memercik asa, saat kuteriakan ikrar membalut luka. Lantas cahaya menyeruak ke dasarnya nirwana laut Onemohete, menyelubungi kuyup raga hingga sekejap tuna wicara, mematung grahita, menikmati buaian kehadiran sosokmu pelepas dahaga pesona.

Di ornamen kerajaan Buton, sekelebat makhluk cantik bermain di langit langit khayal dan mengarahkan pada satu papan nama istana Liya Togo.... bidadari yang berkelebat itu sepertinya baru turun dari surga dan menyandang nama Lia.....

Wakatobi, 6 Mei 2018

Karya: Doedoeng Zenal Arifin, ST, MT (BPIW)



**Buletin Sinergi ini dapat didownload melalui:
bpiw.pu.go.id/publication/bulletin**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
Kementerian PUPR**

